

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) BERBASIS POTENSI WILAYAH

(Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan KIM Tlogomas
Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

RIA NUR AMBARWATI

115030100111046



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

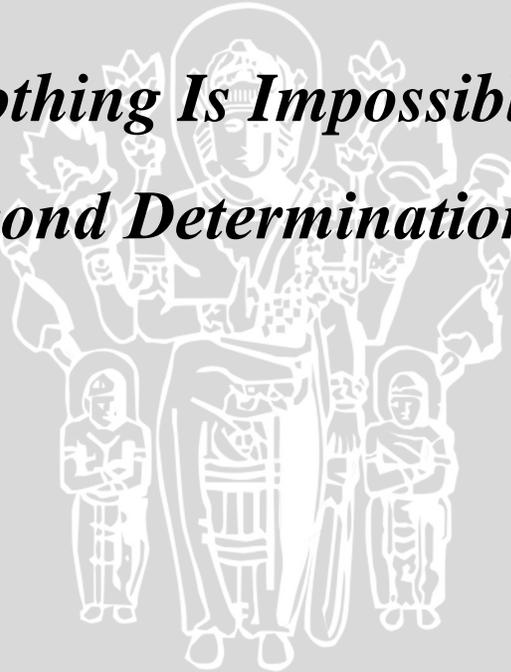
MALANG

2015

MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

*“Nothing Is Impossible
Beyond Determination”*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PEMBERDAYAAN Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang dan KIM Tlogomas)

Disusun : Ria Nur Ambarwati

NIM : 115030100111046

Fakultas : Ilmu Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentorasi : -

Malang, 25 Mei 2015

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Drs. Minto Hadi, M.Si.
NIP. 19540127 198103 1 003

Drs. Siswidiyanto, MS.
NIP. 19600717 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Juni 2015

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Ria Nur Ambarwati

Judul : Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan KIM Tlogomas Kota Malang)

Dan dinyatakan Lulus.

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota



Drs. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

Ketua



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP.19521229 197903 1 003

Anggota



Dr. Rivanto M. Hum
NIP. 19600430 1988601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 21 Mei 2015



Nama: Ria Nur Ambarwati

NIM: 115030100111046

RINGKASAN

Ria Nur Ambarwati, 2015, Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan KIM Tlogomas Kota Malang), Drs. Minto Hadi M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Drs. Siswidiyanto, MS sebagai Dosen Pembimbing II.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas dimana KIM menjalankan fungsinya dalam hal pengelolaan informasi sekaligus melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh wilayah. Pemberdayaan masyarakat terajadi melalui proses peningkatan kesadaran akan pentingnya informasi, peningkatan akses, dan pendayagunaan informasi dalam meningkatkan sumber daya masyarakat dengan mengembangkan potensi yang ada di wilayah Tlogomas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Tlogomas.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode kualitatif peneliti dapat memahami makna suatu peristiwa interaksi dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Lokasi penelitian berada di Kota Malang dan situs penelitian di Dinas Kominfo Kota Malang dan KIM Tlogomas Kota Malang. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas sudah dilakukan dengan melaksanakan program kerja dengan baik oleh KIM Tlogomas. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti komitmen dari anggota, masyarakat yang belum bisa memanfaatkan perkembangan IPTEK, serta latar belakang sosial-budaya. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu meningkatkan komitmen, meningkatkan kerjasama, dan melakukan terobosan pada program kerja KIM Tlogomas dalam memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat Tlogomas benar-benar dapat merasakan secara nyata manfaat adanya KIM Tlogomas.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah

SUMMARY

Ria Nur Ambarwati, 2015, Community Empowerment Through Regional Potential Based Community Information Group (KIM) (Study at Communication and Information Official of Malang City and KIM Tlogomas of Malang City), Drs. Minto Hadi M.Si as Advisor I and Drs. Siswidiyanto, MS as Advisor II.

Community Information Group (KIM) is by community, of community, and for community to be self-supported and creative in organization the activities of information management and community empowerment. The concept of Regional Potential Based Community Information Group (KIM) has been applied by 'KIM Tlogomas' to execute the functions of information management and community empowerment by developing the potential of the region. Community empowerment is realized through improvement of awareness of how important is the information, improvement of access and utilization of information to increase community resources by developing the potentials of Tlogomas Region. Research is aimed to analyze how the implementation of community empowerment through Regional Potential Based Community Information Group (KIM) can be applied at 'KIM Tlogomas' and to identify the factors supporting and constraining the implementation of community empowerment through 'KIM Tlogomas'.

Research method is qualitative research with descriptive approach. Through qualitative method, the author can understand the meaning of interaction event at certain situation. Location of research is in Malang City whereas site of research is at Communication and Information Official of Malang City and 'KIM Tlogomas'. Data analysis uses Miles and Huberman's interactive model.

Result of research indicates that community empowerment through Regional Potential Based Community Information Group (KIM) has been already implemented favorably by good work program delivered by 'KIM Tlogomas'. Barriers are still compromising such as less commitment from group members, less utilization by the community for the output of science and technology advance, and socio-cultural background. It can be suggested that commitment shall be improved, cooperation must be developed, and breakthrough may be tried for work program of 'KIM Tlogomas' to empower the community such that Tlogomas community can take real benefit of 'KIM Tlogomas'.

Keyword : Community Empowerment, Community Information Group (KIM), Regional Potential Based Community Information Group (KIM)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan KIM Tlogomas)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh , M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta memberikan masukan agar sekripsi ini lebih baik.
5. Bapak Drs. Siswidiyanto, MS selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta memberikan masukan agar sekripsi ini lebih baik.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi khususnya Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Seluruh pegawai yang berada di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

8. Bapak Ir. Bambang Nugroho selaku Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi (SKDI) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
9. Ibu Pantjawati Yustikarini, S.Sos selaku Ketua KIM Tlogomas yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di KIM Tlogomas dan meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan pada peneliti dalam melakukan wawancara.
10. Bapak Aryadi Wardoyo selaku Lurah Tlogomas dan seluruh masyarakat Kelurahan Tlogomas yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di KIM Tlogomas dan kesempatan kepada peneliti dalam melakukan wawancara di Kelurahan Tlogomas.
11. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2015

Penulis

Ria Nur Ambarwati

DAFTAR ISI

MOTTO i
 TANDAPENGESAHAN ii
 PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii
 RINGKASAN iv
 SUMMARY v
 KATA PENGANTAR vi
 DAFTAR ISI viii
 DAFTAR TABEL x
 DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
 B. Rumusan Masalah 7
 C. Tujuan Penulisan 7
 D. Kontribusi Penelitian 9
 E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik 13
 B. Administrasi Pembangunan 14
 C. Pembangunan 15
 1. Pengertian Pembangunan 15
 2. Paradigma Pembangunan 16
 3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan 22
 D. Pemberdayaan 24
 1. Pengertian Pemberdayaan 24
 2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan 25
 3. Strategi dan Teknik Pemberdayaan 26
 4. Pemberdayaan Masyarakat 28
 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan 32
 E. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 34
 1. Pengertian Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 34
 2. Dasar Hukum 35
 3. Visi, Misi, dan Fungsi 36
 4. KIM Berbasis Potensi Wilayah 39
 5. Tujuan KIM Berbasis Potensi Wilayah 42



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....43
 B. Fokus Penelitian.....44
 C. Lokasi dan Situs Penelitian.....46
 D. Sumber Data.....47
 E. Teknik Pengumpulan Data.....48
 F. Instrumen Penelitian.....51
 G. Analisis Data.....52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....56
 1. Gambaran Umum Kota Malang.....56
 2. Gambaran Umum Dinas Kominfo Kota Malang.....59
 3. Gambaran Umum KIM Tlogomas Kota Malang.....72
 B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....75
 1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas.....75
 a. Proses Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas.....75
 b. Program Kerja dan Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas.....83
 c. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah dalam Memberdayakan Masyarakat.....98
 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas.....105
 C. Analisis..... 113

BAB V PENUTUP

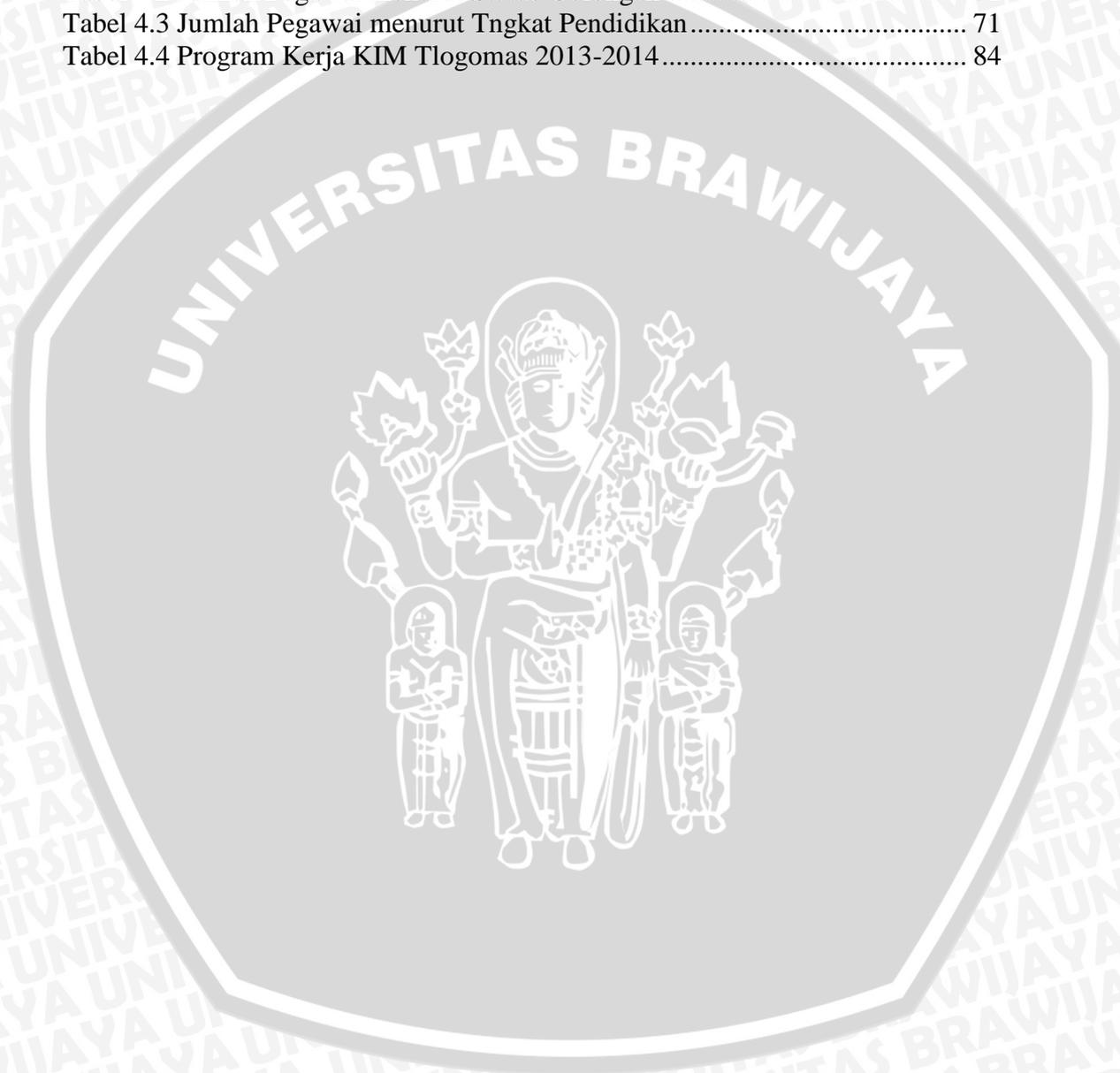
A. Kesimpulan..... 122
 B. Saran..... 128

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Model Klien <i>Empowerment</i>	27
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai menurut Status Kepegawaian.....	71
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai menurut Status Golongan.....	71
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai menurut Tngkat Pendidikan.....	71
Tabel 4.4 Program Kerja KIM Tlogomas 2013-2014.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengertian KIM Berbasis Potensi Wilayah.....	41
Gambar 2.2 Alur Pengembangan dan Pemberdayaan KIM.....	42
Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif.....	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Malang.....	61
Gambar 4.2 Sosialisasi Pembentukan KIM Berbasis Potensi Wilayah.....	78
Gambar 4.3 Susunan Keanggotaan KIM Tlogomas periode 2013-2017.....	80
Gambar 4.4 Tampilan Blog KIM Tlogomas.....	88
Gambar 4.5 Pelatihan Pengelolaan Konten Blog.....	90
Gambar 4.6 Sosialisasi berkaitan dengan KIM Berbasis Potensi Wilayah.....	92
Gambar 4.7 Proses <i>syuting</i> Mengenal Malang Bersama KIM.....	93
Gambar 4.8 <i>Study banding</i> KIM Tlogomas bersama Diskominfo.....	95
Gambar 4.9 Pameran Produk Unggulan KIM Tlogomas.....	96
Gambar 4.10 Budidaya Jamur Kelurahan Tlogomas.....	99
Gambar 4.11 Produksi Abon Jamur.....	102



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan era dimana keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah. Manusia di seluruh belahan dunia dapat mengakses informasi dengan memanfaatkan perkembangan TIK, salah satunya dengan mengakses informasi melalui internet. Berbagai macam informasi tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, bahkan baru akan terjadi dengan mudah dan cepat dapat diakses melalui internet. Dengan mengakses internet kendala dalam memperoleh informasi seperti batasan wilayah atau jarak serta adanya perbedaan waktu antar wilayah dapat diatasi, sehingga internet memudahkan manusia dalam memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan.

Jumlah pengguna internet di dunia menurut *International Telecommunication Union (ITU)* sejumlah 2,044 miliar penduduk dunia pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 telah mencapai 2,421 miliar penduduk dunia. Sejalan dengan pertumbuhan pengguna internet di dunia, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia juga mengalami peningkatan. Di Indonesia jumlah pengguna internet menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia baru mencapai 63 juta orang atau baru mencapai 24,23 persen. Namun, jumlah ini merupakan potensi luar biasa apalagi jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa (BPS, 2012). Hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang, jumlah tersebut berarti tumbuh 13 persen dibandingkan catatan akhir tahun 2012. APJII juga memperkirakan jumlah pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2014 akan terus meningkat menjadi 107 juta orang atau kisaran 44 persen dan pada tahun 2015 jumlah pengguna internet akan semakin meningkat menjadi 139 juta orang atau 50 persen. Pemanfaatan internet untuk mencari berita atau informasi sebesar 78,49 persen, selebihnya internet digunakan untuk mencari barang atau jasa, informasi lembaga pemerintahan, dan sosial media. (dikutip dalam Profil Pengguna Internet Indonesia, 2012)

Menurut Kepala APJII Valens Riyadi dalam acara diskusi terbuka di Jakarta, Rabu pada tanggal 25 Juli 2013, berpendapat sebagai berikut:

“Indonesia memiliki potensi pertumbuhan jumlah pengguna internet lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju seperti Korea Selatan dimana angka penetrasi internet telah mencapai kisaran 80 persen. Namun, pertumbuhannya tidak eksponensial karena luasnya Negara Indonesia, kondisi ini mengakibatkan belum sepenuhnya masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi melalui internet”. (http://tekno.kompas.com/diunduh_pada_tanggal_29/10/2014_pukul_21.30)

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang kondisi geografisnya tersebar dalam berbagai pulau, menyebabkan kendala kesenjangan informasi di kalangan masyarakat karena keterbatasan infrastruktur. Hal tersebut mengakibatkan keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi. Selain itu, potensi sumber daya informasi dalam masyarakat belum terolah dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini diakibatkan karena sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan memadai untuk menelaah muatan informasi karena keterbatasan berbagai faktor, seperti faktor sosial (pendidikan), ekonomi, maupun

kultural. Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam mengelola, memanfaatkan, memilah maupun memilih informasi yang tersedia dapat berdampak pada kontra produktif kerangka pembangunan disegala bidang. Hal ini dikarenakan informasi yang tepat dan akurat berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan.

Perlu adanya pemberdayaan melalui proses peningkatan kesadaran akan pentingnya informasi, peningkatan akses, dan pendayagunaan informasi melalui kelompok. Menurut Moebyarto (1985) dalam Fahrudin (2011:49) menyatakan sebagai berikut :

“Pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial, sehingga kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.

Selanjutnya, masyarakat membentuk kelompok untuk mengatasi persoalan bersama tersebut, kelompok masyarakat yang dimaksud diberi nama Kelompok Informasi Masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat dibentuk berkaitan dengan upaya pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pasal 1 ayat (2), adalah :

“Lembaga Komunikasi Pedesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah”

KIM merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari “kelompen capir” yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintahan dewasa ini. KIM berkedudukan di kelurahan/desa/kampung dan sebutan lainnya. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitas dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap KIM dalam pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. KIM aktif dalam mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang segala aktifitas, sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pasal 4(b) adalah “arah dari pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah”, terwujud dalam fungsi KIM sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, KIM dapat menerapkannya dalam berbagai aktivitas perdagangan, pertanian, industri dan menghasilkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut. Selain itu, melalui informasi yang diperoleh dari berbagai media dan sumber lainnya, masyarakat dapat memperoleh informasi peluang-peluang usaha, permintaan pasar mengenai berbagai produk dan jasa, kemudian KIM dapat melakukan transaksi bisnis, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah.

Kota Malang merupakan kota dengan masyarakat yang sadar informasi. Masyarakat Kota Malang dituntut menjadi masyarakat yang sadar informasi karena Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya, menyebabkan informasi di kota ini dapat berkembang dengan cepat. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan APJII pada tahun 2012, masyarakat Kota Malang yang mengakses informasi melalui internet sejumlah 17,9 persen, lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Timur seperti Jember 17,1 persen, Sidoarjo sebesar 13,8 persen, dan Gresik yang hanya sebesar 11,8 persen (dikutip dalam Profil Pengguna Internet Indonesia, 2012).

Potensi yang telah dimiliki Kota Malang dapat dikembangkan dengan adanya keberadaan KIM tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kota Malang. KIM Kota Malang diperlukan untuk mendukung dan mengembangkan peran strategis dalam menyediakan informasi yang dapat meningkatkan produktivitas dalam kerangka pembangunan Kota Malang. Respon terhadap kehadiran KIM di Kota Malang cukup besar. Saat ini KIM telah berkembang sebanyak 10 yang tersebar di 5 kecamatan Kota Malang. Untuk mewadahi dan memfasilitasi KIM yang ada di kota Malang, maka dibentuklah Forum KIM Kota Malang yang dikukuhkan kepengurusannya pada tanggal 11 Nopember 2013 oleh Bapak Ir. Tifatul Sembiring selaku Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Forum KIM Kota Malang merupakan wadah bagi semua anggota KIM yang ada di Kota Malang untuk saling menjalin komunikasi, tukar menukar informasi, dan bekerja sama dalam mengembangkan KIM di Kota Malang dan memperluas akses

informasi bagi masyarakat kota Malang secara berkesinambungan dan sistematis. (dikutip dalam Profil Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang, 2014:4)

Seiring berjalannya KIM di Kota Malang, kini KIM dikembangkan berbasis pada potensi wilayah yang dimiliki setiap daerah, khususnya di tingkat kelurahan yang merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah pada era otonomi daerah saat ini. Analisis potensi wilayah telah menjadi hal yang tidak asing dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara tersirat memberikan makna bahwa peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan tersebut harus melalui suatu analisis yang dapat menguraikan potensi-potensi wilayah menjadi penunjang daya saing daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Pada kenyataannya, walaupun analisis potensi wilayah menjadi hal yang harus dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan, namun masih banyak daerah yang belum mampu menggunakan analisis potensi wilayah sebagai upaya untuk menggali seluruh potensi yang dimiliki, baik dari segi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia serta masih banyak sektor sumber daya alam yang belum dimobilisasi sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak akan terjadi apabila pemerintahan daerah benar-benar memahami arti penting dan manfaat dari analisis potensi wilayah itu sendiri. (dikutip dalam Profil Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang, 2014:29).

Salah satu potensi masyarakat yang bisa diikutsertakan untuk bisa berkiprah dalam mengoptimalkan potensi wilayah adalah KIM itu sendiri. Untuk itu,

KIM yang ada di Kota Malang perlu dikembangkan dan berinovasi dengan paradigma baru di atas. KIM di Kota Malang yang dikembangkan berbasis pada potensi wilayah adalah KIM Tlogomas yang berada di Kelurahan Tlogomas. Dalam hal ini KIM Tlogomas tidak hanya melakukan pengelolaan informasi, akan tetapi sekaligus melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah yang dimiliki kelurahan Tlogomas. KIM Tlogomas berdiri pada tanggal 9 Maret 2014 masih minim prestasi. Namun, memiliki banyak potensi di segala bidang, mengingat Kelurahan Tlogomas merupakan pintu gerbang kawasan sebelah barat Kota Malang sebagai pintu masuk segala akses informasi dan banyak kegiatan yang berkembang seperti industri, pergudangan, pendidikan, perdagangan, dan jasa. KIM Tlogomas dihadapkan pada tantangan untuk mengelola secara optimal semua potensi yang ada di wilayah kelurahan Tlogomas, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah dicita-citakan yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat Tlogomas.

Urgensi dan manfaat “Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah” diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran KIM yang ada di Kota Malang sebagai lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selain itu, dapat memahami arti penting dan manfaat analisis potensi wilayah sehingga dapat menjadi bekal dalam membangun Kota Malang ke arah yang lebih baik. Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) BERBASIS POTENSI WILAYAH (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan KIM Tlogomas)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang ada adalah :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas Kota Malang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas Kota Malang ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas Kota Malang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya terdapat kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Kontribusi Akademis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis potensi wilayah.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis potensi wilayah.

E. Sistematika Pembahasan

Maksud dari Sistematika Pembahasan adalah sebagai susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah, yang disusun secara garis besar dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan mempermudah pemahaman untuk mendapatkan suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis. Dengan demikian dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab. Pertama, berisi tentang Latar Belakang masalah yang merupakan alasan yang menjadi dasar dari pemilihan judul penelitian serta fenomena-fenomena dan permasalahan yang dijumpai. Kedua, Rumusan Masalah penelitian yang meliputi bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui KIM berbasis potensi wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas di Kota Malang dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas Kota Malang. Ketiga, Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat melalui

KIM berbasis potensi wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas di Kota Malang dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas Kota Malang. Keempat, Kontribusi Penelitian yang meliputi kontribusi akademis yaitu bagi mahasiswa dan perguruan tinggi, serta kontribusi praktis yaitu bagi pemerintah dan masyarakat. Kelima, Sistematika Penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi definisi operasional variabel-variabel penelitian yang membahas tentang tujuan dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah teknis praktis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Pertama, mengenai jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian. Ketiga, Lokasi dan situs penelitian yakni di Kota Malang. Keempat, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keenam, instrument penelitian melalui peneliti sendiri, *field note*, dan pedoman wawancara. Kedelapan, analisis data melalui tahap-tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang temuan-temuan penelitian yang dihasilkan dari pengolahan dan analisis data yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis peneliti terhadap temuan-temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada di dalam bab dua.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dengan menemukan benang merah pokok permasalahan yang telah dibahas. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan gambaran pemberdayaan masyarakat melalui KIM berbasis potensi wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas di Kota Malang dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui KIM berbasis potensi wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua pengertian yaitu administrasi dan publik. Indradi (2006:1) kata administrasi yang dikenal di Indonesia berasal dari kata *administrare* dalam bahasa Latin berasal dari kata “*ad* = pada, *ministare* = melayani”. Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup “*stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumber daya)”. Dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen. Indradi (2006:2) menyatakan dengan berkembangnya administrasi sebagai cabang tersendiri, pengertian administrasi juga ikut berkembang. Mulai yang memandang administrasi sebagai usaha, manajemen, proses samapai pada pemerintahan.

Selanjutnya, Indradi (2006:110) menyatakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*public*”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) diartikan sebagai orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebagainya). Pendapat lain dikemukakan oleh Hakim (2011:21) yang menyatakan kata publik sebagai masyarakat luas lawan dari individu, kata publik juga menunjukkan pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah.

Administrasi publik sendiri memiliki beberapa pengertian menurut para pakar. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988) dikutip Hakim (2011:20-21) adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Mc Curdy (1986) dikutip Indradi (2006:114) administrasi publik dalam "*Public administration: Abibliograpical guide to the literature*" menyebut administrasi publik sebagai proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Pendapat lain tentang administrasi publik juga dikemukakan oleh Nicholas Henry dikutip Indradi (2006:116) adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Berdasar berbagai pendapat para pakar yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan administrasi publik sebagai keseluruhan proses, baik yang dilakukan oleh organisasi (pemerintah) berkaitan dengan penerapan maupun pelaksanaan kebijakan publik sebagai alat untuk menjalankan fungsi suatu negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam "rumpun" administrasi negara. Fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka

pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman (Siagian, 2012:3).

Siagian (2012:4) menyatakan administrasi pembangunan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Selanjutnya, Siagian (2012:5) menyatakan batasan pengertian atau definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Berdasar definisi yang dijelaskan sebelumnya ide pokok dari administrasi pembangunan adalah sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh negara untuk mendorong atau mendukung pertumbuhan serta perubahan-perubahan secara sadar dan terencana dalam berbagai segi kehidupan ke keadaan yang lebih baik menuju ke arah modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) pada akhirnya untuk pencapaian tujuan.

C. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan seringkali menjadi fokus dalam menjalankan suatu negara dan dijadikan sebagai ukuran oleh sebuah negara untuk meraih keberhasilan dan

kesuksesan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Siagian (2012:4-5) menyebutkan tujuh ide pokok dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).
- 2) Pembangunan merupakan upaya yang sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- 3) Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.
- 4) Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan perubahan mengandung makna bahwa suatu negara harus bersifat antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
- 5) Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- 6) Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat multi-dimensional.
- 7) Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

Perubahan dan pertumbuhan merupakan sesuatu yang mutlak terjadi dalam pembangunan. Pembangunan sebagai perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai pertumbuhan menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang.

2. Paradigma Pembangunan

Paradigma merupakan alur pemikiran atau pandangan yang mendasar dari suatu ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang perlu dipelajari. Suryono (2010:16) menyatakan bahwa paradigma negara-negara maju cenderung ditiru oleh

negara-negara berkembang. Namun, negara berkembang mengimplementasikan dengan waktu singkat karena negara berkembang tidak sabar mendapatkan hasil yang baik dengan waktu yang singkat, sedangkan pencapaian negara maju sesungguhnya memerlukan waktu yang lama dan melalui tahapan yang banyak, hal tersebut mengakibatkan terjadinya percepatan pergeseran paradigma di negara berkembang dan mengakibatkan kegagalan.

Beberapa pergeseran paradigma pembangunan menurut Suryono (2010:16-25) adalah sebagai berikut :

a. Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategy*)

Strategi pertumbuhan dengan pendekatan *growth priority* diadopsi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada dasawarsa 1960. Asumsi dari pendekatan tersebut bahwa peningkatan pendapatan perkapita dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Paradigma pertumbuhan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak negatif pada kondisi sosial berupa ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju serta kesenjangan sosial dan lingkungan hidup berupa kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.

Selanjutnya, datang kritik dari *Massachusetts Institute of Technology and Club of Rome* dikutip Suryono (2010:17) menyatakan “jika laju pembangunan dunia dan pertumbuhan penduduk tetap dibiarkan seperti ini, maka lambat atau cepat akan terjadi kehancuran total sistem planet bumi”. Selain hal tersebut, menurut Krotten dikutip Suryono (2010:17) bahwa pembangunan nasional yang dirumuskan oleh

pusat cenderung mengesampingkan peran masyarakat sehingga menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat dan ketergantungan masyarakat pada birokrat. Ancaman lain yang perlu diperhitungkan adalah adanya pembangunan ekonomi yang berpusat pada industrialisasi padat modal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat harus dikombinasikan dengan usaha pemerataan dalam pembagian pendapatan dan penurunan laju pertumbuhan penduduk.

b. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Growth With Distribution Paradigm*)

Strategi utama dalam paradigma ini adalah *employment-oriented development*. Digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar yang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pendekatan tersebut yaitu : (1) Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien dan bermanfaat untuk masyarakat; (2) Investasi pada rakyat miskin melalui perbaikan pendidikan, penyediaan fasilitas umum dan sebagainya; (3) Distribusi konsumsi atau pendapatan melalui alokasi barang konsumsi secara langsung maupun sistem fiskal; (4) Pengalihan harta yang sudah ada pada masyarakat miskin misalnya *land reform*.

Pendekatan ini dinilai gagal karena pendekatan ini berdampak pada kebutuhan akan teknologi tinggi, hal ini mengakibatkan permintaan tenaga kerja hanya pada tenaga kerja yang mempunyai pendidikan tinggi sehingga orang yang tidak berpendidikan jauh dari kesejahteraan nasional.

c. Paradigma Teknologi Tepat Guna (*Appropriate Technology Paradigm*)

Paradigma ini berasumsi bahwa untuk perluasan kesempatan kerja tidak hanya bisa dilakukan dengan mengembangkan pola kebutuhan masyarakat tetapi melalui penciptaan barang-barang produksi dengan padat karya. Dengan adanya teknologi tepat guna maka diharapkan sumber daya lokal dapat dimanfaatkan untuk sumber penghasilan penduduk, oleh karena itu pendekatan ini dinilai dapat berhasil diterapkan di negara berkembang. Sasaran yang ingin dicapai pada pendekatan ini adalah perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran, peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kreativitas masyarakat, menyiapkan masyarakat dalam penerimaan teknologi baru, serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Namun, pendekatan ini dinilai tidak dapat mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan nasional karena beberapa faktor yaitu tidak ada institusi pengembang teknologi tepat guna, biaya penciptaan teknologi baru lebih mahal dibandingkan dengan teknologi impor sehingga produk lokal tidak dapat bersaing dengan produk impor dan sistem nilai yang tidak mendukung.

d. Paradigma Kebutuhan Dasar Pembangunan (*Basic Needs Development Paradigm*)

Paradigma ini terdapat pada dokumen yang diterbitkan ILO berjudul “*Employment, Growth and Basic Needs*”, yang menyatakan bahwa tema utama pembangunan pada negara berkembang adalah *basic needs* yaitu penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Kebutuhan dasar bukan hanya meliputi sandang, pangan dan papan tetapi juga pemenuhan kebutuhan air bersih, kesehatan, pendidikan, transportasi serta kebutuhan sanitasi. Fokus paradigma pembangunan ini adalah pembangunan pedesaan sehingga pendekatan ini dapat dikatakan sebagai

community development bukan *central planning*. Namun, paradigma ini dianggap gagal karena pembangunan pedesaan dianggap penting tetapi tidak menghasilkan apapun.

e. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Paradigm*).

Diprakarsai oleh *The Club of Rome* pada tahun 1972 yaitu sekelompok orang yang terdiri dari ilmuwan dan ahli teknik seluruh Eropa. Paradigma ini di latar belakangi oleh ketersediaan sumber daya alam yang memprihatinkan dalam menunjang kelanjutan kehidupan masyarakat. Ditandai dengan kerusakan hutan di Eropa barat, kelaparan di Afrika, menipisnya lapisan ozon, menurunnya kualitas lingkungan di negara tropis, serta efek rumah kaca yang semakin serius. Masalah lingkungan tersebut mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan sehingga muncul konsep ini. Konsep paradigma ini adalah konsep pembangunan ramah lingkungan dimana pembangunan ini merupakan perpaduan bagaimana melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat suatu negara dengan sumber daya yang dimiliki, sekaligus mempertahankan kelangsungan generasi selanjutnya.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh paradigma ini adalah adanya kenyataan kebutuhan masyarakat miskin berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan keterbatasan sumber daya, teknologi, dan kemampuan organisasi sebagai penopang di sisi lain. Di Indonesia pembangunan nasional yang berkelanjutan hanya menjadi slogan dan tidak menjadi realita. Aktivitas produksi dalam rangka meningkatkan perekonomian masih terus dilaksanakan dengan

mengorbankan golongan lemah dan masyarakat miskin, hal ini terlihat dengan masih banyak pembangunan yang dilakukan tanpa memikirkan dampaknya terhadap ekologi.

f. Paradigma Pemberdayaan (*Empowerment Paradigm*)

Di latar belakang kegagalan model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga muncul alternatif perbaikan yang menyertakan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan *gender*, kesetaraan antar generasi serta pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu, penekanannya pada pemberian kebebasan kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan pada sumber daya lokal, partisipasi masyarakat, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan tidak dapat mengesampingkan unsur di luar "*civil society*" oleh karena itu Friadmann dikutip Saryono (2010:22) bahwa "pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi yang baik secara nasional maupun internasional". Pada tahapan ideologis konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi konsep "*top-down* dan *bottom-up*", sedangkan pada tahapan praktis terjadi akibat persaingan otonomi. Masalah-maslah yang terjadi dalam proses pembangunan suatu negara melingkupi segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam mengatasi berbagai masalah tersebut pemerintah menggunakan berbagai cara dan salah satunya dengan pemberdayaan.

3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Menurut Siagian (2012:142-150) pemerintah dapat berperan selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu, dijelaskan sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah Selaku Stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator merupakan salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif. Peran pemerintah selaku stabilisator dilakukan di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Peran pemerintah selaku stabilisator yaitu dalam hal mewujudkan perubahan yang tidak berubah menjadi gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: (a) kemampuan selektif yang tinggi; (b) proses sosialisasi yang elegan tapi efektif; (c) melalui pendidikan; (d) pendekatan yang persuasif; dan (e) pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh ke depan” (*quantum leap*).

b. Peran Pemerintah Selaku Inovator

Inovasi merupakan salah satu produk dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan di atas. Inovasi dapat dilakukan mulai dari menerapkan

inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi pada sistem, prosedur, maupun metode kerja.

c. Peran Pemerintah Selaku Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi dari pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) kemampuan dan kemahiran manajerial; (c) kemampuan mengolah kekayaan alam; (d) sistem pendidikan yang handal sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang produktif; (e) landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis; (f) memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan; (g) rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya; (h) kesediaan mengambil resiko; dan (i) orientasi masa depan; serta (j) bersedia menerima perubahan.

d. Peran Pemerintah Selaku Pelopor

Telah dibahas sebelumnya pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Secara eksplisit pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memerankan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat.

e. Peran Pemerintah Selaku Pelaksana Sendiri

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata. Berkaitan dengan

berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

D. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Secara harfiah, *empowerment* pemberian kekuasaan atau pemberian kekuatan. Ife (1995) mengatakan “*empowerment aims to increase the power of disadvantaged*”, artinya pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Swift dan Levin (1987) cenderung mengartikan *empowerment* sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (*reallocation of power*). Sedangkan Rappaport (1984) mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan dapat berkuasa atas kehidupannya (Fahrudin, 2011:16).

Torre (1985) dalam Fahrudin (2011:16-17) mengidentifikasi tiga dimensi yang berkaitan dengan konsep *empowerment* yaitu:

- 1) Suatu proses perkembangan yang dimulai ketika individu tumbuh dan mungkin dapat mencapai puncak dalam perubahan sosial yang lebih besar.
- 2) Suatu keadaan psikologis yang ditandai keyakinan diri, efikasi diri, dan kontrol diri.
- 3) Kebebasan sebagai hasil dari suatu gerakan sosial, dimana bermula dengan pendidikan dan politisasi kekuasaan rakyat dan secara kolektif dengan kekuasaannya untuk memperoleh kekuatan dan untuk merubah struktur-struktur sosial yang timpang dan menekan (Parson, et al., 1994:106).

Kieffer (1981) dalam Fahrudin (2011:17) mengemukakan tentang tiga dimensi yang berkaitan dengan makna *empowerment* adalah kompetensi kerakyatan (*citizenship competence*), tidak buta atau melek sosiopolitik (*sociopolitical literacy*) dan kompetensi partisipasi (*participatory competence*). Kompetensi-kompetensi di atas dipengaruhi oleh sikap personal atau perasaan diri sehingga mendorong secara aktif untuk berkembang secara sosial, pengetahuan dan kapasitas untuk menganalisis secara kritis sistem sosial dan politik sehingga mengerti dan memahami keadaan lingkungannya, kemampuan untuk mengembangkan strategi kegiatan dan penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan kemampuan melakukan penataan sumber-sumber eksternal dan dalam kerangka mencapai tujuan kolektif.

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Dari pendapat beberapa pakar pekerjaan sosial diantaranya; Solomon (1976), Swift & Levin (1987), Kieffer (1981), Rappaport (1981,1984), dan DuBois & Miley (1992) dalam Fahrudin (2011:47) disimpulkan beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan, antara lain :

- a. *Empowerment* adalah proses kolaboratif, dimana klien dan pekerja sosial bekerjasama sebagai *partner*.
- b. Proses *empowerment* melihat sistem klien sebagai pemegang peranan penting (*competent*) dan mampu memberikan akses sebagai sumber-sumber dan peluang-peluang.
- c. Klien harus menerima diri mereka sendiri sebagai *causal agent*, yang mampu untuk mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup.
- e. Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan hasil kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhinya (Solomon, 1976).
- f. Jaringan sosial informal adalah sumber pendukung yang penting untuk menjembatani tekanan dan membangun kompetensi dan kontrol diri.

- g. Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka, dan dalam mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka artikulaskan sendiri.
- h. Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam *empowerment* (Swift & Levin, 1987).
- i. *Empowerment* merupakan upaya untuk memperoleh sumber-sumber dan kemampuan menggunakan sumber-sumber tersebut dengan cara yang efektif.
- j. Proses *empowerment* adalah proses yang dinamis, sinergis, selalu berubah dan berevolusi, karena masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara pemecahan.
- k. *Empowerment* dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi dan perkembangan sosio-ekonomi.

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi. Prinsip-prinsip ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan antara kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

3. Strategi dan Teknik Pemberdayaan

Fahrudin (2011:18) dalam konteks pekerjaan sosial klien yang perlu di *empowerment* mencakup individu, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat. Secara garis besar, strategi dan teknik *empowerment* dilihat dari tiga bentuk (Lihat tabel 1.1). Tiga bentuk intervensi tersebut adalah intervensi mikro, intervensi mezzo, dan intervensi makro. Beberapa ahli menganggap bahwa *empowerment* umumnya dilakukan secara kolektif sehingga strateginya juga harus bersifat kolektif. Akan tetapi dalam beberapa situasi, strategi *empowerment* dapat dilakukan secara *eksklusif* atau tersendiri yang pada gilirannya tetap berkaitan dengan kolektivitas.

Tabel 1.1 Model Klien *Empowerment*

No.	Strategi/ Pendekatan	Sasaran	Teknik	Tujuan
1.	MIKRO (Sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas atau <i>task centered approach</i>)	Individu, Keluarga	Konseling, Terapi, Bimbingan, Pembinaan, Manajemen Stres, Konseling Perkawinan dan Intervensi Krisis (<i>crisis intervation</i>)	Mengurangi tekanan, menumbuhkan kesadaran, <i>self image</i> , konsep diri, tumbuhnya motivasi, mengenal potensi, kemampuan dan kelemahan, mengarahkan, membimbing dan melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2.	MEZZO	Kelompok, <i>Peer Group</i> , <i>Self Help Grop</i>	Pendidikan. Pelatihan, Dinamika Kelompok	Peningkatan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap agar dapat mengatasi masalah sendiri dan kelompok.
3.	MAKRO (sering disebut sebagai <i>large system strategy</i>)	Komunitas dan Masyarakat	Kebijakan Sosial, Perencanaan Sosial, Kampanye, <i>Lobbying</i> , Media Massa <i>appeal</i> , Pengorganisasian Masyarakat dan Manajemen Konflik.	Partisipasi masyarakat, meningkatkan performa kinerja/organisasi, perubahan kebijakan, dan perubahan sosio-ekonomi.

Sumber : Hasil adaptasi Ife (1995:64), dan Parson, Jorgensen, & Hemandes (1994:60-61), serta Netting, Kettner, &McMurtry (1993:251) dalam (Fahrudin, 2011: 19)

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi yang mulanya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat yang berkesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif.

Sumodiningrat (1997) dalam Fahrudin (2011:47) pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat menurut Suzane Kindervatter (1979) dalam Fahrudin (2011:74) adalah proses pendidikan non formal dalam membelajarkan masyarakat sehingga memiliki pemahaman dan mampu mengendalikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam upaya untuk meningkatkan kedudukannya di masyarakat.

Fahrudin (2011:74) pemberdayaan masyarakat menggunakan delapan prinsip, yaitu: (1) dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil; (2) pemberian tanggung jawab kepada kelompok tersebut; (3) kepemimpinan kelompok dilakukan oleh anggota kelompok; (4) pendidik berperan sebagai fasilitator; (5) proses pembelajaran dilakukan secara demokratis; (6) kesatuan pemahaman antara kelompok dengan pendidik tentang upaya mencapai tujuan; (7) peningkatan status sosial, ekonomi, dan kemampuan politik dalam masyarakat; (8) dampak bagi

kemajuan diri dan masyarakat mencakup pembelajaran orang lain dan partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pembelajaran dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui: (1) pelatihan dan bimbingan kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan alam sekitar; (2) pembelajaran dan pelatihan keterampilan fungsional yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lingkungan; dan (3) pembinaan dan pembangunan kerjasama untuk memecahkan masalah, yaitu membawa suatu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik (Fahrudin, 2011:75).

Payne (1997) dalam Fahrudin (2011:47) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan pada intinya bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang dilakukan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki masyarakat, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Pemberdayaan bukan berarti melepaskan pengendalian, tapi menyerahkan pengendalian. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah masalah hilangnya pengendalian atau hilangnya hal-hal lain, yang paling penting pemberdayaan masyarakat seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat sendiri.

a. Kelompok sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dari tingkat individu, keluarga, kelompok, komunitas sampai pada tingkat institusi atau kelembagaan. Semuanya itu mencerminkan adanya bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan akan

menghasilkan pembangunan. Peran aktif masyarakat berlandaskan atas inisiatif masyarakat lokal (Fahrudin, 2011:168).

Medium kelompok dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan kelompok menurut Vitayala (1986) dalam Fahrudin (2011:168) mempunyai kelebihan antara lain proses adopsi dapat dipercepat, karena adanya interaksi sesama anggota kelompok dalam bentuk mempengaruhi satu sama lain. Menurut Norman (1997) dalam Fahrudin (2011:51) di dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenal kepentingan mereka bersama. Dengan demikian, Fahrudin (2011:169) menyatakan penggunaan kelompok merupakan mekanisme yang lebih baik daripada mekanisme-mekanisme lainnya dan bahwa kelompok memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang apabila digali dan dikembangkan atas nama dan kerjasama kelompok dapat menjadi sumber-sumber untuk penembuhan dan pengembangan anggota-anggotanya.

Untuk melihat bagaimana kemampuan kelompok dalam melayani kepentingan kolektif dari anggotanya perlu diperhatikan ukuran dan perilaku kelompok. Simmel dalam Fahrudin (2011:170) bahwa kelompok-kelompok kecil dapat bertindak secara lebih meyakinkan dan menggunakan sumber-sumber yang mereka miliki secara lebih efektif daripada kelompok-kelompok besar. Berdasar hal tersebut, maka kelompok terutama kelompok kecil memiliki potensi yang dapat digunakan untuk membantu individu-individu, baik dalam memenuhi kebutuhan tertentu maupun dalam memecahkan masalah-masalah.

b. Peran Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Siagian (2012:38) mengatakan bahwa informasi paling kuat dampaknya bagi kehidupan manusia. Semua segi kehidupan dan penghidupan manusia tidak ada yang tidak disentuh oleh informasi, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok masyarakat, tingkat organisasi, tingkat bangsa, dan bahkan pada skala global. Perkembangannya begitu pesat sampai ada pandangan yang mengatakan bahwa “industri jasa di bidang informasi yang antara lain berarti bahwa keunggulan kompetitif organisasi di masa depan akan ditentukan oleh pemilikan informasi”. Oleh karena itu, bukan menjadi hal aneh lagi apabila informasi merupakan aset kritikal sangat penting (*critical asset*) suatu organisasi.

Perkembangan yang tidak kalah penting untuk dipahami ialah terjadinya “perkawinan” antara teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi komunikasi telah membuat dunia semakin kecil dan membuat hukum alam tentang ruang dan waktu seolah-olah tidak berlaku lagi. Berbagai informasi dapat diakses melalui internet dengan *World Wide Web*-nya yang semakin luas adalah contoh nyata dari “hasil perkawinan” ini. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan teknologi informasi dimungkinkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu tidak cukup bagi suatu masyarakat bangsa untuk sekedar mampu menggunakan teknologi canggih dan tinggi itu, yang lebih diperlukan adalah penguasaannya (Siagian, 2012:39).

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan menurut Notoatmodjo (1998:11-13) antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor internal mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pemimpin maupun anggota organisasi yang bersangkutan.

Secara rinci faktor-faktor tersebut adalah :

1) Misi dan Tujuan Organisasi

Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik, serta implementasi perencanaan secara tepat. Dalam mencapai tujuan diperlukan kemampuan tenaga yang hanya dapat dicapai dengan pengembangan masyarakat.

2) Strategi pencapaian tujuan

Misi dan tujuan organisasi mungkin mempunyai strategi yang berbeda. Untuk itu diperlukan kemampuan anggota dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan di luar yang mempunyai dampak terhadap organisasi. Sehingga strategi yang disusun dapat memperhitungkan dampak yang akan terjadi terhadap organisasinya.

3) Sifat dan jenis kegiatan

Sifat dan jenis kegiatan sangat penting pengaruhnya terhadap pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, maka pola

pengembangan SDM akan berbeda dengan organisasi yang melaksanakan kegiatan bersifat ilmiah.

4) Jenis teknologi yang digunakan

Hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dalam pengembangan SDM untuk mempersiapkan tenaga guna mengoperasikan teknologi atau mungkin otomatisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

b. Faktor Eksternal

Organisasi itu berada dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana organisasi tersebut berada. Agar organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuan maka harus memperhitungkan faktor lingkungan maupun eksternal organisasi tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri dan sebagainya adalah arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. Kebijakan tersebut sudah pasti akan berpengaruh terhadap pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan.

2) Sosial-Budaya Masyarakat

Faktor sosial-budaya masyarakat tidak dapat diabaikan oleh organisasi. Hal ini dapat dipahami karena organisasi apapun yang didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial-budaya yang berbeda-beda.

3) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perkembangan IPTEK dewasa ini berkembang sedemikian pesatnya. Organisasi yang baik harus dapat mengikuti perkembangan tersebut, oleh karena itu organisasi harus mampu memilih teknologi yang tepat serta kemampuan anggota harus diadaptasikan dengan kondisi tersebut.

Berbagai faktor baik internal dan eksternal yang telah dijelaskan di atas dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pemberdayaan. Oleh karena itu, organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

E. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

1. Pengertian Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan Kelompok Informasi Masyarakat selanjutnya disebut KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara sendiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah di tingkat kecamatan meliputi cakupan pengembangan fasilitas dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat kecamatan. KIM berkedudukan di kelurahan/ desa/ kampung atau sebutan lainnya. Anggota KIM dapat berjumlah 3 (tiga) orang sampai 30 (tiga puluh) orang, yang dapat terdiri dari semua lapisan

masyarakat dari masyarakat, pelajar/ mahasiswa, pedagang, petani, masyarakat, dan sebagainya, mulai dari remaja sampai orang dewasa/tua, baik laki-laki/ perempuan.

Sampai dengan saat ini di Kota Malang KIM yang telah berkembang sebanyak 10 yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Sukun
 - 1) KIM Bijak di Kelurahan Bandungrejosari
- b. Kecamatan Lowokwaru
 - 1) KIM Lestari di Kelurahan Tunjungsekar
 - 2) KIM Kanuruhan di Kelurahan Dinoyo
 - 3) KIM Tlogomas di Kelurahan Tlogomas
- c. Kecamatan Klojen
 - 1) KIM Cenderawasih di Kelurahan Kasin
- d. Kecamatan Kedungkandang
 - 1) KIM Cemara Hijau di Kelurahan Cemoro Kandang
 - 2) KIM Anugerah di Kelurahan Lesanpuro
 - 3) KIM Kendang Arema di Kelurahan Kedungkandang
- e. Kecamatan Blimbing
 - 1) KIM Purwoagung di Kelurahan Purwantoro
 - 2) KIM Andong Merah di Kelurahan Pandanwangi

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah :

- a. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 Maret 2009
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010.

3. Visi , Misi, dan Fungsi KIM

a. Visi KIM

Terwujudnya KIM yang inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera.

b. Misi KIM

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya KIM secara mandiri sebagai wahana informasi dalam masyarakat;
2. Meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antar pemerintah dengan masyarakat dan antar golongan masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi;

4. Mengembangkan aktivitas KIM dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah masyarakat;
5. Meningkatkan aktivitas KIM dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c. Fungsi KIM

Fungsi KIM sebagai berikut :

- 1) Sebagai Wahana Informasi,
 - a) Antar anggota KIM secara horisontal dapat saling bertukar informasi tentang segala sesuatu yang diketahuinya sehingga akan berarti juga saling berbagi pengetahuan.
 - b) Dari KIM ke Pemerintah Kabupaten/Kota secara *bottom-up* kepada para anggota masyarakat yang jadi anggota KIM dapat memberikan saran-saran kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota tentang apa yang harus dibangun sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan setempat. Anggota KIM menjadi perencana dan pelaksana bagi pembangunan lokal. Asas pemberdayaan ini sangat sesuai dengan pendekatan pembangunan komunitas.
 - c) Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat secara *top-down* para anggota KIM menjadi agen pembangunan yang menyebarluaskan gagasan pembangunan nasional ke tingkat lokal.
- 2) Sebagai mitra dialog dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam merumuskan kebijakan publik.

Dengan KIM yang mengetahui kebutuhan publik dan karakteristiknya, Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Kota Malang dalam merumuskan kebijakan publik dapat menjadikan KIM sebagai mitra dialog. Selain itu KIM dapat berfungsi sebagai mitra dialog dalam mendukung pelaksanaan semua kebijakan publik dan memonitoring pelaksanaannya.

- 3) Sebagai Peningkatan Literasi Masyarakat di Bidang Informasi dan Media Masa serta Teknologi Informasi dan Komunikasi di kalangan anggota KIM dan Masyarakat.
 1. Fungsi untuk meningkatkan literasi di Bidang Informasi, yaitu bagaimana agar memandang bahwa upaya memperoleh informasi sebagai kebutuhan hidup dan sudah terbiasa mencari informasi dari berbagai sumber;
 2. Fungsi sebagai literasi Media Massa, merupakan kemampuan menggunakan media massa secara cerdas dan sehat dan mampu mendayagukannya dalam kehidupan masyarakat;
 3. Fungsi literasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, ialah kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer dan internet untuk kepentingan mengakses informasi atau untuk mendayagunakan sebagai jasa dan produk teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Sebagai Lembaga yang Memiliki Nilai Ekonomi.

- a) Melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, KIM dapat menerapkannya dalam berbagai aktivitas perdagangan, pertanian, industri dan menghasilkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut;
- b) Melalui informasi yang diperoleh dari berbagai media dan sumber lainnya, masyarakat dapat memperoleh informasi peluang-peluang usaha, permintaan pasar mengenai berbagai produk dan jasa, kemudian KIM dapat melakukan transaksi bisnis, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- c) Informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dikemas sedemikian rupa dalam bentuk bahan informasi (buku, buletin, bahan audio visual) yang dapat dijual kepada pihak lain yang membutuhkan. Jadi informasi itu sendiri setelah dikemas, akan bias mendatangkan nilai ekonomi.

4. KIM Berbasis Potensi Wilayah

Definisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) seperti yang telah disampaikan sebelumnya menurut Direktorat Kelembagaan adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Dikutip dalam Profil Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang (2014:29) berbasis bisa diartikan sebagai menjadikan sesuatu sebagai dasar. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan,

kesanggupan dan daya. Berpotensi artinya memiliki potensi. Menurut kamus bahasa Indonesia potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Setiap orang memiliki potensi, dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu orang dengan orang lain.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (UU Nomor 24 Tahun 1992: Penataan Ruang). Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang membentuk suatu teritorial berdasarkan batas geografis tertentu (seperti suatu wilayah aliran sungai, wilayah kehutanan, wilayah dataran tinggi, wilayah pulau, wilayah Negara). Berbasis Potensi Wilayah adalah semua kekayaan atau sumber daya fisik maupun non fisik pada area atau wilayah tertentu sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu dijadikan dasar untuk mengembangkan sesuatu (dikutip dalam Profil Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang, 2014:29).



Gambar 2.1 Pengertian KIM Berbasis Potensi Wilayah (dalam Profil Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang, 2014:30)

Dengan demikian pengertian KIM Berbasis Potensi Wilayah adalah “suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuannya dengan mengembangkan semua kekayaan atau sumber daya nonfisik maupun fisik yang meliputi rona sosial, budaya, ekonomi dan rona fisik pada area atau wilayah tertentu” (Bambang Nugroho dalam Profil Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang, 2014:31).

5. Tujuan KIM Berbasis Potensi Wilayah

TUJUAN :

- Mediator Komunikasi & Informasi Pemerintah kepada Masyarakat secara Timbal Balik
- Penerima & Penyebaran Informasi yang berinteraksi sesama Anggota Masyarakat
- Mitra Pemerintah dalam Menyebarluaskan Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, & akuntabel

Pengembangan & Pemberdayaan

Fungsi :

1. Wahana Informasi
2. Mitra Dialog
3. Peningkatan Literasi Masyarakat
4. Lembaga yang Memiliki Nilai Ekonomi (Penyedia informasi dan fasilitas pengembangan ekonomi rakyat)

Potensi Wilayah :

- ~ Sejarah
- ~ Pemerintahan
- ~ Sosial Budaya
- ~ Religius
- ~ Perekonomian
- ~ Produk Unggulan

Pemanfaatan
teknologi informasi

Gambar 2.2 Alur Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Berbasis Potensi Wilayah (dalam Profil Kelompok Informasi Kota Malang, 2014:35).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui sebuah fenomena yang terjadi dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep, dan pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan adanya kesesuaian antara situasi dan kondisi agar metode penelitian yang digunakan tepat dalam memperoleh pemahaman berdasarkan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Usman dan Akbar (2009) kata deskriptif sendiri berasal dari bahasa Inggris *descriptive* yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data-data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini disebut metode kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku

manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar, 2009:78).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggambarkan atau melukiskan secara ilmiah tentang fenomena yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan kemudian diinterpretasikan secara tepat sehingga menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Penggunaan jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Di sini peneliti bermaksud mendapatkan gambaran nyata tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas Kota Malang secara sistematis dan faktual di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan batas ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan sehingga laporan yang dibuat ditampilkan lebih jelas dan objek yang diteliti tidak melebar dan terlalu luas.

Menurut Moleong (2014), ada dua tujuan peneliti dalam menggunakan fokus antara lain:

1. Penetapan fokus membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus membatasi bidang inkuiri.
2. Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang

walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas
 - a) Proses pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas.
 - 1) Sosialisasi KIM Berbasis Potensi Wilayah
 - 2) Pembentukan KIM Berbasis Potensi Wilayah
 - b) Program Kerja dan Aktor yang terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas.
 - c) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah dalam Memberdayakan Masyarakat
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah dalam rangka meningkatkan produktivitas SDM yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas Kota Malang.
 - a) Faktor pendukung dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah

yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas Kota Malang.

- 1) Faktor Internal
- 2) Faktor Eksternal

b) Faktor penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas Kota Malang.

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang diteliti berlangsung sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian.

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Malang. Sedangkan situs penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan KIM Tlogomas Kota Malang. Beberapa pertimbangan peneliti mengambil lokasi penelitian dan situs penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian :

Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki masyarakat sadar akan informasi.

2. Situs Penelitian :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagai dinas yang memayungi KIM dianggap mampu memberikan informasi yang tepat, valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan KIM Tlogomas Kota Malang merupakan KIM yang telah menerapkan KIM berbasis potensi wilayah dianggap mampu menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh peneliti.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Alat yang menjadi sumber informasi adalah seseorang yang bertindak sebagai informan yang berfungsi untuk dijadikan atau dipilih sebagai narasumber sehingga memperoleh data yang sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi wawancara mendalam.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Koordinator pelaksana Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yaitu Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi (SKDI)

- b) Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas
- c) Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas
- d) Kepala Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru
- e) Masyarakat Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru selaku sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Yakni data-data berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas, yang diperoleh melalui buku profil Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Malang, peraturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas, foto-foto kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang dilakukan di Kelurahan Tlogomas, dan referensi dari internet yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data tergantung pada teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara menurut Ezterberg (2002) dikutip Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Jenis wawancara ada dua, antara lain adalah:

- 1) Wawancara tidak terarah adalah wawancara yang tidak terarah atau pewawancara bebas menanyakan apa saja.
- 2) Wawancara terarah adalah tanya jawab yang terarah dengan pertanyaan yang lengkap dan terperinci untuk mengumpulkan data-data yang relevan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini adalah menggabungkan keduanya yaitu dengan menggunakan sederet pertanyaan yang disusun secara terperinci terlebih dahulu kepada informan, yang selanjutnya jawaban dari informan dijadikan acuan peneliti untuk pertanyaan berikutnya. Dengan demikian diharapkan informasi yang didapat penulis tentang objek yang diteliti lebih lengkap dan memadai secara langsung dari jawaban informan.

2. Observasi

Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologi observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan

pewmusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Metode observasi merupakan metode yang mengharuskan peneliti berada di lokasi kejadian untuk mengamati objek yang diteliti sehingga dapat mengetahui lebih rinci tentang objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagai SKPD yang menjalankan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas yang terletak di Kelurahan Tlogomas yang mana diterapkannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah. Dengan turun langsung ke lokus penelitian diharapkan peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan rinci objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, peneliti memfokuskan pengumpulan dan memanfaatkan arsip yang ada pada Dinas Informasi dan Informatika Kota Malang, buku yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas, artikel yang ada pada media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas, dan foto-foto kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang dilakukan di Kelurahan Tlogomas, sehingga dapat dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas Kota Malang. Dalam penelitian ini peneliti berhasil mengumpulkan buku profil Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Malang dan peraturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas.

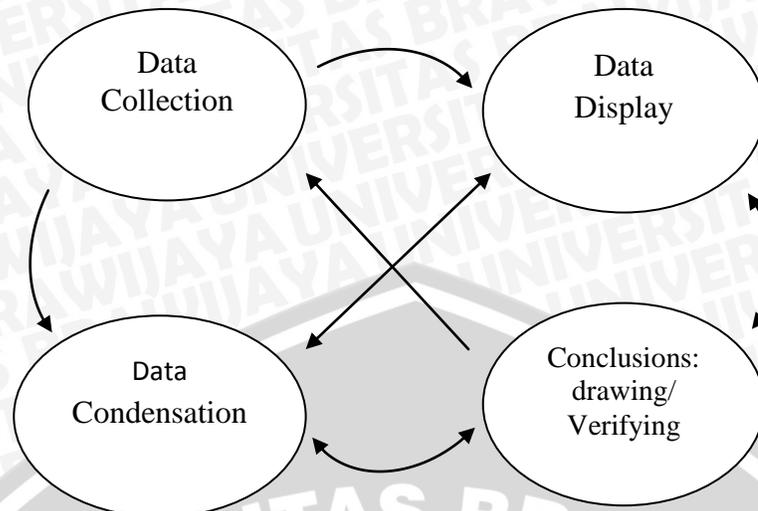
F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang ditunjang dengan pencatatan dokumen dan pencatatan secara sistematis dengan menggunakan beberapa alat bantu elektronik. Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada proses wawancara dan analisis data. Seperti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Instrumen pembantu, terdiri dari:
 - a) Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu berupa materi poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan informan.
 - b) Catatan lapangan (*field note*) yaitu catatan penelitian di lapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian ditunjang dengan pengambilan gambar atau foto.

G. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014). Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Model ini terdiri dari tiga hal yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun tujuannya adalah untuk menyajikan data menjadi lebih sistematis, faktual dan akurat. Berikut adalah gambar Komponen Analisis Data Miles and Huberman :



Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif
Sumber : Miles Huberman (2014:33)

Dari komponen gambar Analisis Data Miles dan Huberman dalam Saldana (2013) menjelaskan ketiga alur kegiatan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang di dapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara data diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci.

Selanjutnya laporan tersebut disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus, baik selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap analisa data selanjutnya, yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep

yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian Data

Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti dari data hasil wawancara antara peneliti dengan partisipan yang sudah dikondensasi, peneliti membuat tabel berdasarkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan diuraikan inti dari jawaban pertanyaan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan adanya alur sebab akibat dan proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang pada catatan lapangan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, juga upaya-upaya yang luas untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam data yang lain dan data harus diuji kebenarannya. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Contohnya setelah melalui proses kondensasi data dan penyajian data, data hasil penelitian yang diperoleh peneliti harus disesuaikan dengan teori yang sudah ada. Jika dalam data dengan teori tersebut terdapat sebuah hubungan atau kesamaan, maka peneliti harus mengambil garis besar dari hasil penelitian tersebut disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Kondisi Kota Malang

Kota Malang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06 – 112,7 Bujur Timur, 7.06 – 8.02 Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Karangploso, Kab. Malang
- 2) Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang, Kab. Malang
- 3) Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec Pakisaji, Kab. Malang
- 4) Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec.Dau, Kab. Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan desa/kelurahan dalam membangun wilayahnya, tercatat seluruh desa/kelurahan masuk ke dalam kategori desa Swasembada. Hal itu berarti bahwa seluruh

kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri.

b. Sejarah Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya

akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

c. Visi dan Misi Kota Malang

Visi :

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Misi :

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
- 6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.

- 7) Mendorong pelaku ekonomi sector informal agar lebih produktif dan kompetitif.
- 8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan.
- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang

a. Lokasi Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang terletak di Jl. Mayjend Sungkono Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4, Kel. Arjowinangun Kota Malang.

b. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang

Visi :

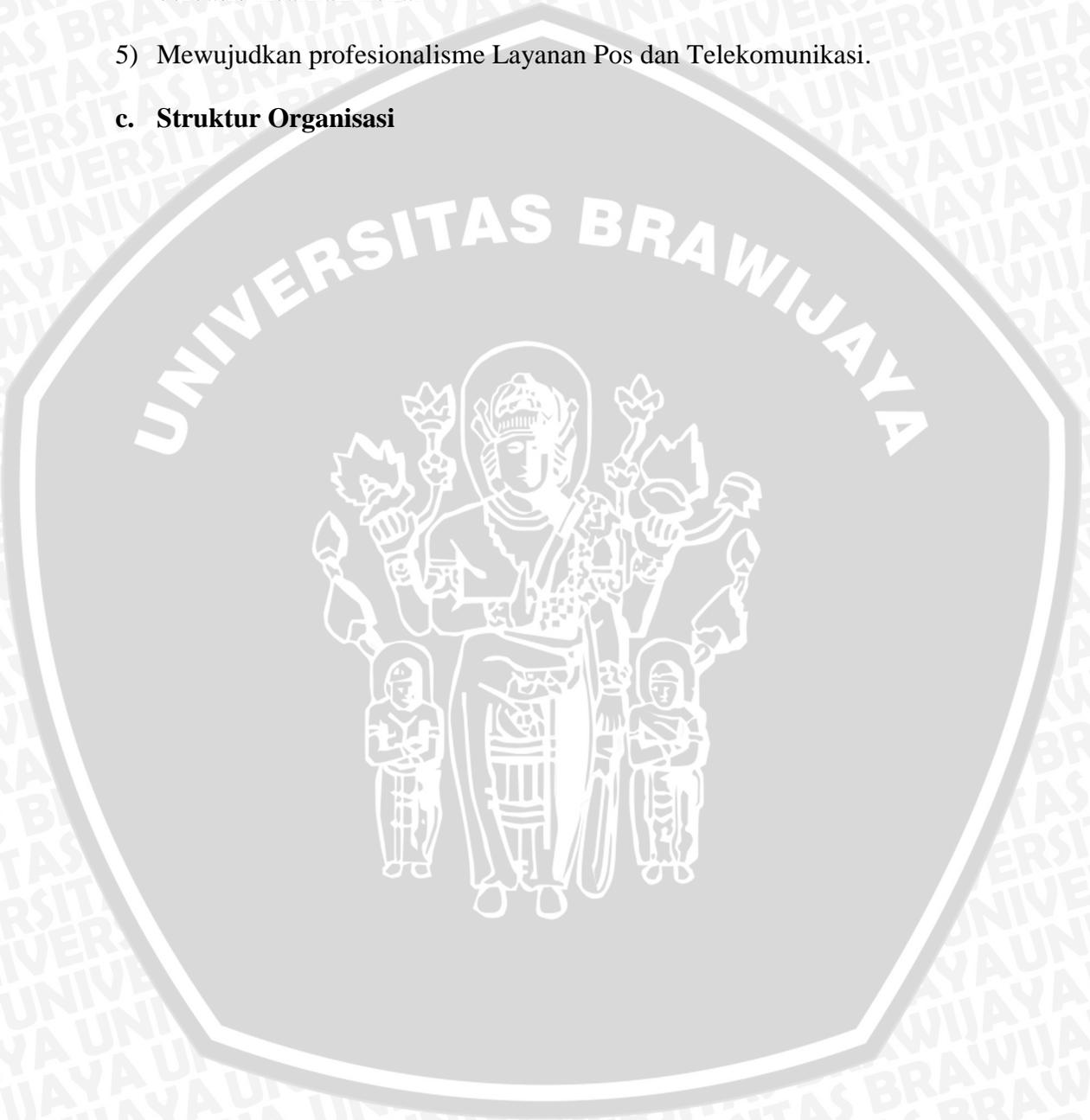
“TERWUJUDNYA KOTA MALANG INFORMATIF (Inovatif, Fleksibel, Original, Maju, Terukur, Integritas, Faktual)”

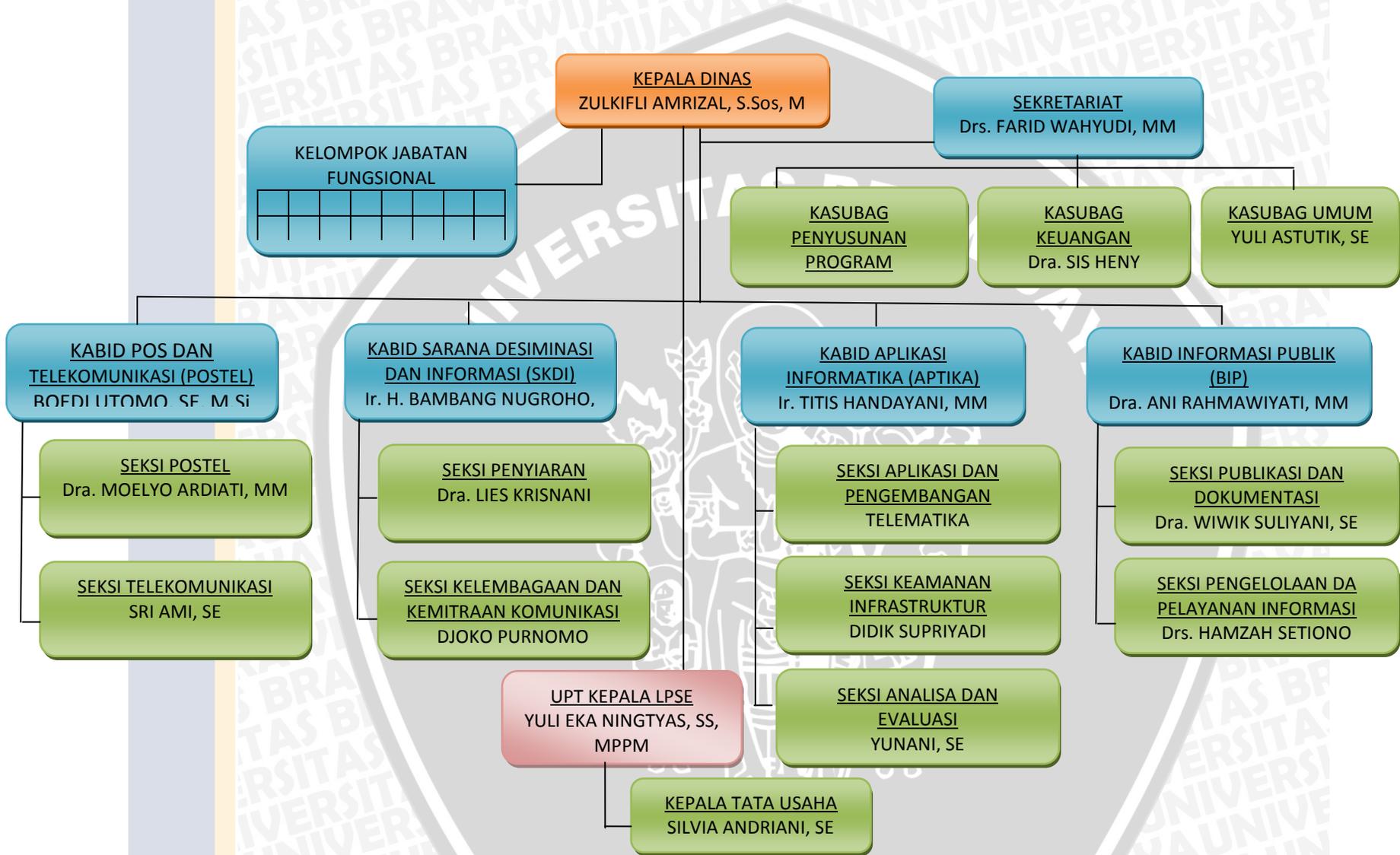
Misi :

- 1) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- 2) Mengoptimalkan Sistem Layanan Pemerintahan (*e-Government*) yang terintegrasi.
- 3) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 4) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan Lokal.
- 5) Mewujudkan profesionalisme Layanan Pos dan Telekomunikasi.

c. Struktur Organisasi





Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2015

d. Tugas Dan Fungsi

Berdasar Perwal Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, secara keseluruhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- 2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 3) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 4) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 5) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- 6) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- 7) pelaksanaan urusan rumah tangga;
- 8) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- 9) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 10) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 11) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 12) pengelolaan anggaran;
- 13) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 14) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- 15) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 16) pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 17) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 18) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 19) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 20) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- 21) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika;
- 22) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;

- 23) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 24) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

b) Bidang Pos dan Telekomunikasi

Bidang Pos dan Telekomunikasi melaksanakan tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan jasa pos dan telekomunikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pos dan Telekomunikasi
- 2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis manajemen Pos dan Telekomunikasi dan pengelolaan sarana Pos dan Telekomunikasi;
- 3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang manajemen Pos dan Telekomunikasi dan pengelolaan sarana Pos dan Telekomunikasi;
- 4) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pos dan telekomunikasi;
- 5) pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha pos dan telekomunikasi;
- 6) pemrosesan izin usaha jasa titipan yang bersifat lokal (*city courier*);
- 7) pemrosesan pertimbangan teknis izin usaha titipan untuk kantor cabang/pusat;
- 8) pelaksanaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal;

- 9) pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
- 10) pemrosesan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- 11) pemrosesan pertimbangan teknis permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline*;
- 12) pemrosesan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- 13) pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, Warung Internet, Warung Seluler atau sejenisnya;
- 14) pemrosesan izin Kantor Cabang dan Loker pelayanan operator;
- 15) pemrosesan izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
- 16) pemrosesan izin instalasi penangkal petir;
- 17) pemrosesan izin instalasi genset;
- 18) pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran atas ketentuan standarisasi pos dan telekomunikasi;
- 19) pemrosesan pertimbangan teknis izin usaha perdagangan alat perangkat komunikasi
- 20) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

- 21) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 22) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 23) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 24) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 25) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 26) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

c) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi melaksanakan tugas pokok penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- 2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat;
- 3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

- 4) pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pendirian stasiun penyiaran radio dan televisi;
- 5) pemrosesan pertimbangan teknis izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- 6) penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, media elektronik, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pertunjukan rakyat dan media lainnya
- 7) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 8) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 9) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 10) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 11) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 12) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

d) Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika melaksanakan tugas pokok pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika, pelaksanaan keamanan infrastruktur, serta pelaksanaan analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika. Untuk

melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika;
- 2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika, pelaksanaan keamanan infrastruktur, serta pelaksanaan analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika;
- 3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika, pelaksanaan keamanan infrastruktur, serta pelaksanaan analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika;
- 4) penyiapan perumusan kebijakan pengembangan di bidang *e-government*, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta standarisasi serta monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
- 5) pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika;
- 6) pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem aplikasi informatika;
- 7) pengembangan sarana dan prasarana aplikasi informatika dalam mendukung implementasi *e-government*;
- 8) penyiapan system aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah;

- 9) peningkatan dan pemberdayaan system aplikasi informatika;
- 10) pemrosesan pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan system aplikasi informatika;
- 11) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 12) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 13) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 15) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 16) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

e) Bidang Informasi Publik

Bidang Informasi Publik melaksanakan tugas pokok pelayanan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi Publik;
- 2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelayanan informasi publik;

- 3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan informasi publik;
- 4) pelaksanaan sistem dan indentifikasi informasi daerah;
- 5) pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana informasi publik;
- 6) pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pengaduan publik melalui *website* Pemerintah Daerah;
- 7) pelaksanaan program dokumentasi dan publikasi;
- 8) pelaksanaan program pengembangan informasi melalui kerja sama dengan instansi terkait;
- 9) pelaksanaan penyuluhan informasi publik;
- 10) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 11) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 12) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 13) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 14) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 15) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

e. Potensi Sumber Daya Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya memiliki 42 pegawai. Status dari 42 pegawai per-Januari 2014 terdiri dari 37 PNS dan 5 pegawai tidak tetap atau kontrak seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai menurut Status Kepegawaian

Komposisi Status Kepegawaian			
1.	PNS	37	Orang
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP (KONTRAK)	5	Orang
	Jumlah	42	Orang

Sumber : Dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2014

Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terbagi ke dalam spesifikasi golongan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai menurut Golongan

Komposisi Golongan			
1.	Golongan I	2	Orang
2.	Golongan II	5	Orang
3.	Goongan III	25	Orang
4.	Goongan IV	5	Orang
	Jumlah	37	Orang

Sumber : Dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2014

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi Pendidikan PNS/CPNS			
1.	SD	-	Orang
2.	SMP	-	Orang
3.	SMA	4	Orang
4.	D III	-	Orang
5.	D IV/S1	26	Orang
6.	S2	7	Orang
	JUMLAH	37	Orang

Komposisi Pendidikan PEGAWAI TIDAK TETAP (TENAGA KONTRAK)

1.	SMA	-	Orang
2.	D III	1	Orang
3.	D IV/S1	4	Orang
	JUMLAH	5	Orang

Sumber : Dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2014

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang dengan status PNS/CPNS. Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D III hanya 1 orang dengan status pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak. Pegawai dengan tingkat pendidikan D IV/ S1 berjumlah 30 orang yang terdiri dari 26 orang berstatus PNS/CPNS dan 4 orang berstatus pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak. Sedangkan lainnya sejumlah 7 orang adalah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S2.

3. Gambaran Umum KIM Tlogomas

a. Sejarah KIM Tlogomas

Kelurahan Tlogomas merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kawasan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, terletak di sebelah utara Kota Malang, tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Jarak pusat pemerintahan Kelurahan Tlogomas dengan Kecamatan Lowokwaru sejauh 4 km, sedangkan dengan pusat Kota Malang sejauh 10 km, dan jarak dengan Propinsi Jawa Timur sejauh 100 km. Kelurahan Tlogomas mempunyai luas 1.807.945, 83 m dan memiliki 9 RW.

Pada mulanya Kelurahan Tlogomas masuk wilayah Dau Kabupaten Malang. Sejak awal tahun 1990-an, Tlogomas masuk ke dalam wilayah Kota Malang. Seiring dengan hal tersebut maka sistem pemerintahannya mengalami perubahan dari pemerintahan desa menjadi kelurahan. Perubahan masyarakat kabupaten menjadi masyarakat perkotaan ditunjang dengan pesatnya kemajuan teknologi dan pembangunan di segala bidang meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dan komunikatif.

Tujuan dari pembentukan KIM Tlogomas adalah menyediakan media informasi yang efisien, efektif, dan komunikatif dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat Tlogomas serta mengangkat dan mengelola informasi secara optimal semua potensi yang ada di wilayah Kelurahan Tlogomas. Dengan motto “Maju, Tumbuh, dan Bersemangat” menjadikan KIM Tlogomas berupaya dapat bersinergi dengan semua pihak untuk ikut membangun khususnya dalam peningkatan sumberdaya masyarakat Tlogomas guna mendukung pembangunan di segala bidang.

b. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Kota Malang tentang Organisasi dan Tata Kerja Nomor 6 Tahun 2012 Dinas;
- 6) Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

c. Visi dan Misi KIM Tlogomas

Visi :

Terwujudnya masyarakat madani yang mengerti dan paham informasi secara sehat, cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif dan mandiri melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, komperhensif dan terarah sehingga dapat ikut mensukseskan program program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat yang berbudaya.

Misi :

- 1) Mendorong tumbuh dan kembangnya KIM secara mandiri.
- 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam memperlancar arus informasi
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi untuk mengatasi kesenjangan informasi
- 4) Mengembangkan pendayagunaan informasi di masyarakat hingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian**1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas.****a. Proses Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas.****1) Tahap Sosialisasi**

Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan dengan mendorong kelompok-kelompok masyarakat mendayagunakan informasi dan komunikasi agar memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan kembali membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan Tlogomas. Pembentukan KIM di Kelurahan Tlogomas untuk mengoptimalkan jumlah KIM di Kota

Malang. Diharapkan ke depannya setiap kelurahan memiliki minimal satu KIM. Selain itu, pertimbangan membentuk KIM di Kelurahan Tlogomas mengingat bahwa Kelurahan Tlogomas merupakan pintu gerbang kawasan sebelah barat Kota Malang sebagai pintu masuk segala akses informasi dan banyak kegiatan yang berkembang. Oleh karena itu, Kelurahan Tlogomas dinilai perlu melakukan pembinaan melalui KIM untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan SDM di kelurahan.

Pada tahap awal pelaksanaan pembentukan KIM di Kelurahan Tlogomas dilakukan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2014. Sosialisasi KIM Berbasis Potensi Wilayah dilakukan pada semua elemen yang ada di Kelurahan Tlogomas. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui KIM, sosialisasi menyampaikan materi tentang rencana pembentukan KIM, tujuan pembentukan KIM serta manfaat KIM bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Tlogomas. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Bambang Nugroho selaku Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi (SKDI) sebagai berikut:

“Berdasar Keputusan Wali Kota Malang No: 188.45/186/35.73.112/2014 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "Tlogomas" Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melalui Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi (SKDI) akan kembali membentuk KIM di Kelurahan Tlogomas. Pertimbangan pembentukan KIM di Kelurahan

Tlogomas dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan SDM di kelurahan, perlu dilakukan pembinaan dengan membentuk KIM. Sebelum membentuk KIM di Kelurahan Tlogomas, Dinas Kominfo melalui Bidang SKDI melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan pada bulan Februari bertempat di Gedung Pertemuan kantor Kelurahan Tlogomas kepada seluruh elemen di Kelurahan Tlogomas yang terdiri dari unsur kelurahan, perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Malang, dan perwakilan dari masyarakat Tlogomas. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat akan peranan KIM". (Wawancara hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Pernyataan tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Irul selaku masyarakat Kelurahan Tlogomas berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

"Iya, benar sekali sebelum dibentuknya KIM di Kelurahan Tlogomas, masyarakat Tlogomas diberikan sosialisasi seputar KIM. Mulai dari apa itu KIM, tugas dan fungsi KIM termasuk peranan KIM dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Tlogomas sangat antusias dengan kegiatan sosialisasi tersebut karena dapat menambah wawasan masyarakat tentang KIM dengan begitu masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan KIM nantinya". (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Tlogomas)

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan agar masyarakat Tlogomas mengenal dan memahami KIM serta peran dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga tumbuh keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan KIM dalam pemberdayaan masyarakat serta memberikan kontribusi secara nyata pada KIM. Dukungan seluruh elemen di Kelurahan Tlogomas sangat

dibutuhkan untuk tahap selanjutnya yaitu pembentukan KIM di Kelurahan Tlogomas.



Gambar 4.2 Sosialisasi pembentukan KIM Berbasis Potensi Wilayah di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru

Sumber : Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2014

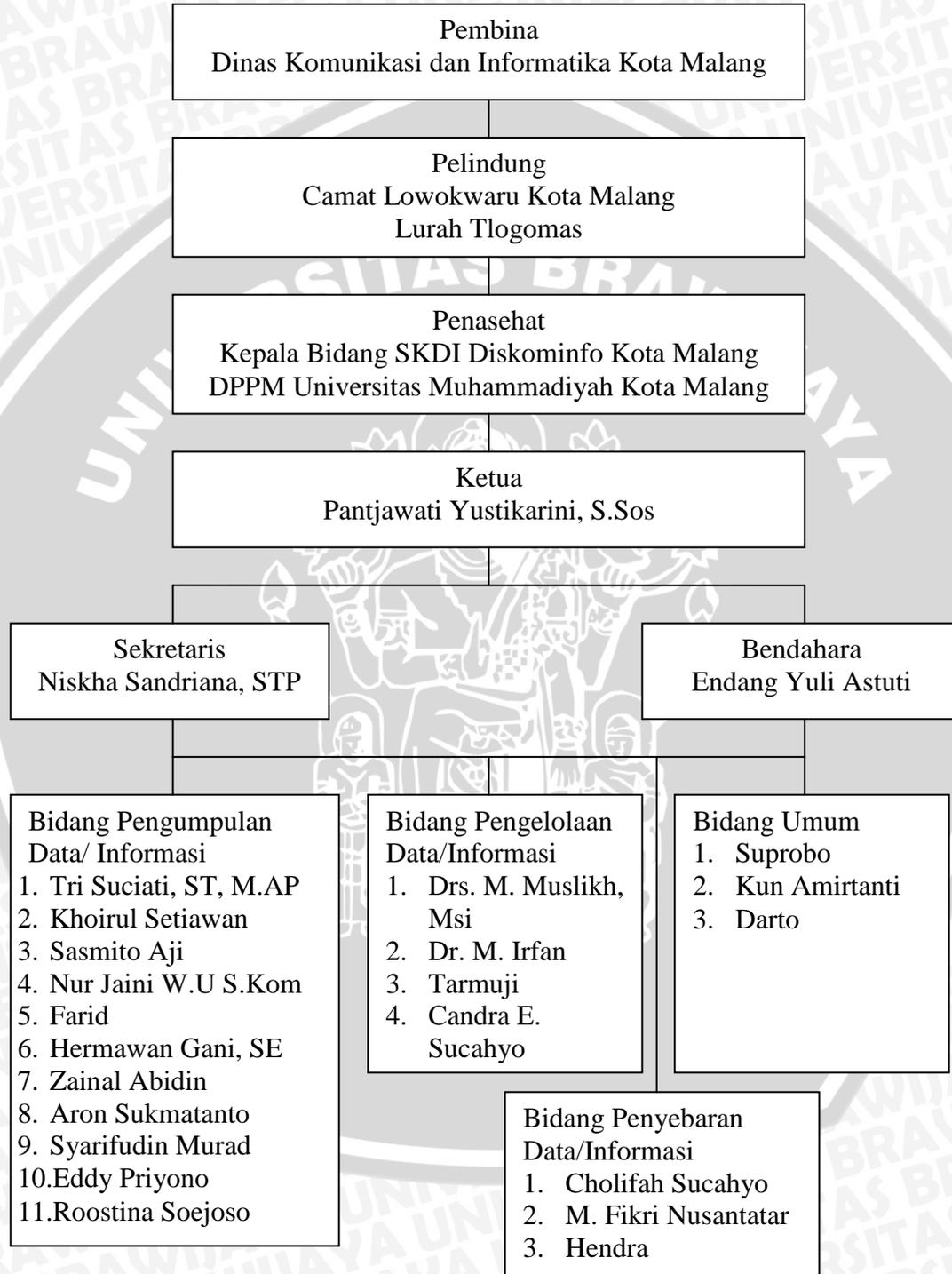
2) Tahap Pembentukan

Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi KIM yang dilakukan di wilayah Kelurahan Tlogomas maka pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 bertempat di Gedung Pertemuan kantor Kelurahan Tlogomas diadakan rapat pembentukan kepengurusan KIM. Selanjutnya untuk pemberian nama KIM, dimana melalui proses musyawarah mufakat ditetapkan nama KIM Kelurahan Tlogomas adalah “KIM TLOGOMAS”. KIM Tlogomas merupakan KIM ketiga yang dibentuk di Kecamatan Lowokwaru setelah sebelumnya membentuk KIM Lestari di Kelurahan Tunjungsekar dan KIM Kanuruhan di Kelurahan Dinoyo. Setelah dilakukan pembentukan, kegiatan selanjutnya adalah menggalang anggota dari masyarakat Tlogomas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat

Tlogomas seperti perguruan tinggi (UMM), perwakilan masyarakat dari tiap RW, perwakilan unsur Karang Taruna, Unsur PKK, BKM, dan LPMK. Dari hasil rapat tersebut ditetapkan Pantjawati Yustikarini, S.Sos sebagai Ketua KIM Tlogomas. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut :

“Saya sangat terhormat saat ditunjuk menjadi Ketua KIM Tlogomas. Sebelumnya saya sendiri sudah aktif dalam beberapa kegiatan kelurahan, khususnya bergabung dalam Tim Penggerak PKK Kelurahan Tlogomas. Dalam hal ini saya memiliki tanggungjawab jauh lebih besar yang dibebankan pada saya, ini memang pengabdian dan betul-betul berkegiatan sosial. Akan tetapi saya optimis dapat menjalankan tanggungjawab tersebut karena saya di sini tidak sendiri, keberadaan KIM sendiri didukung oleh berbagai pihak. Dukungan masyarakat Tlogomas juga sangat penting terhadap keberadaan KIM. Saya harap KIM Tlogomas dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu meningkatkan SDM Kelurahan Tlogomas”.
(Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Berdasar Lampiran Keputusan Wali Kota Malang No: 188.45/186/35.73.112/2014 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "Tlogomas" Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang periode 2014-2017 Susunan Keanggotaan Kelompok Informasi Masyarakat "Tlogomas" Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang periode 2014-2017, sebagai berikut :



Gambar 4.3 Susunan Keanggotaan KIM Tlogomas periode 2014 – 2017
 Sumber : Blog KIM Tlogomas <https://kimtlogomas.wordpress.com/>

KIM Tlogomas adalah KIM pertama di kota Malang yang dibentuk dengan mengimplementasikan konsep “KIM Berbasis Potensi Wilayah” yang digagas oleh Ir. H. Bambang Nugroho selaku Kabid SKDI Diskominfo Kota Malang. Konsep KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas dimana KIM tetap menjalankan fungsinya dalam hal pengelolaan informasi sekaligus juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah. Proses pemberdayaan masyarakat terjadi melalui proses peningkatan kesadaran akan pentingnya informasi, peningkatan akses, dan pendayagunaan informasi dalam meningkatkan sumber daya masyarakat dengan mengembangkan potensi yang ada di wilayah Tlogomas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bambang Nugroho selaku Kabid SKDI sebagai berikut:

“KIM Tlogomas merupakan KIM pertama di Kota Malang yang akan dibangun dengan mengimplementasikan konsep KIM Berbasis Potensi Wilayah. Konsep KIM Berbasis Potensi Wilayah sangat tepat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Tlogomas yang secara letak geografisnya merupakan wilayah yang heterogen. KIM Berbasis Potensi Wilayah adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuannya dengan mengembangkan semua kekayaan atau sumberdaya non fisik maupun fisik yang meliputi rona sosial, budaya, ekonomi dan rona fisik pada area atau wilayah tertentu. KIM Berbasis Potensi Wilayah dimana KIM melakukan pengelolaan informasi sekaligus pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi yang dimiliki wilayah. Diharapkan KIM Tlogomas tidak hanya menjadi media informasi yang efektif, efisien dan komunikatif dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat Tlogomas, tetapi juga KIM Tlogomas dapat bersinergi dengan semua pihak

untuk ikut membangun dalam peningkatan sumberdaya masyarakat Tlogomas. Konsep ini nantinya juga akan diterapkan pada KIM lainnya yang ada di Kota Malang”. (Wawancara hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM

Tlogomas berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Konsep KIM Berbasis Potensi Wilayah merupakan gagasan Bapak Bambang selaku Kabid SKDI yang diterapkan pada KIM Tlogomas. Saya selaku ketua KIM Tlogomas mendukung gagasan tersebut, karena dalam hal ini KIM tidak hanya melakukan pengelolaan informasi, akan tetapi sekaligus melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi yang dimiliki wilayah Kelurahan Tlogomas. Konsep berbasis potensi wilayah ini dinilai sangat cocok diterapkan, karena dengan begitu pemberdayaan masyarakat dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Tlogomas. KIM Tlogomas merupakan KIM pertama di Kota Malang yang menjalankan konsep KIM Berbasis Potensi Wilayah, dengan begitu KIM Tlogomas dapat digunakan sebagai acuan atau tolok ukur oleh KIM yang lain”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

KIM diberikan kewenangan untuk mengelola, menentukan program kerja atau jenis kegiatan KIM, dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan keinginan anggota KIM. Namun, tetap berdasarkan pada tugas dan fungsi yang telah diamanatkan pada KIM serta tetap berdasar pada kebutuhan masyarakat.

b. Program Kerja dan Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas

KIM Tlogomas memiliki beberapa program kerja. Program kerja KIM Tlogomas dibuat berdasar tugas yang telah diamatkan pada KIM Tlogomas periode 2014-2017. Sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Wali Kota Malang No:188.45/186/35.73.112/2014 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "Tlogomas" Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang periode 2014-2017, sebagai berikut :

- a. selaku mediator, fasilitator, dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
- b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh, dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
- d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi;
- e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan pada tugas-tugas KIM Tlogomas yang telah dijelaskan sebelumnya, KIM Tlogomas memiliki beberapa program kerja yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Di bawah ini adalah tabel program kerja KIM Tlogomas sekaligus dapat melihat aktor yang terlibat dalam setiap program kerja sebagai berikut:

Tabel 4.4 Program Kerja KIM Tlogomas Tahun 2014 – 2015

No	Program Kerja	Jenis Kegiatan	Aktor
1.	Membuat masyarakat sadar informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan Kelurahan Tlogomas menjadi pusat informasi bagi warganya - Pembuatan media blog tentang KIM Tlogomas - Melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam bidang informasi. 	Kelurahan Tlogomas, Dinas KOMINFO Kota Malang, dan DPP UMM

No	Program Kerja	Jenis Kegiatan	Aktor
2.	Meningkatkan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi KIM Berbasis Potensi Wilayah kepada masyarakat Tlogomas - Sosialisasi KIM Berbasis Potensi Wilayah menggunakan media televisi 	Kelurahan Tlogomas, Dinas KOMINFO Kota Malang, dan Malang TV (pihak swasta)
3.	Mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi terkait baik regional maupun nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>study banding</i> kepada KIM di Kota Malang dan KIM di kota lainnya yang sudah berjalan - Mengadakan acara pameran produk unggulan yang ada di Kelurahan Tlogomas - Mengikuti lomba LCKK 	Dinas KOMINFO Kota Malang dan Dinas KOMINFO Prov. Jatim

Sumber : Blog KIM Tlogomas <https://kimtlogomas.wordpress.com/>

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dikaji program kerja KIM Tlogomas dimulai dengan menjadikan masyarakat Tlogomas sebagai masyarakat yang sadar akan informasi. Menjadikan Kelurahan Tlogomas menjadi pusat

informasi bagi warganya dengan menempatkan kantor KIM di Kelurahan Tlogomas bertempat di Jl. Raya Tlogomas no. 56. Menempatkan kantor KIM berada di Kelurahan Tlogomas diharapkan dapat memudahkan masyarakat secara langsung memperoleh informasi tentang berbagai kegiatan KIM. Selain itu, menempatkan kantor KIM di kelurahan juga sebagai bentuk dukungan dari Kelurahan Tlogomas pada KIM. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut:

“Kelurahan Tlogomas sangat mendukung keberadaan KIM dengan menyediakan salah satu ruangan di kelurahan sebagai kantor KIM, di Malang hanya KIM Tlogomas yang berkantor di kelurahan, lainnya kantor KIM berada di rumah anggota. Penempatan kantor KIM di kelurahan memudahkan KIM dalam melaksanakan tugasnya karena beberapa kegiatan KIM seperti pertemuan anggota struktural dan beberapa kegiatan sosialisasi pada masyarakat dilakukan di kelurahan. Kantor KIM buka setiap hari kerja Senin-Jumat pukul 13.00-16.00 WIB”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Aryadi Wardoyo selaku Lurah Tlogomas berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Memang benar jika pihak kelurahan mmemberikan salah satu ruangan di kelurahan untuk digunakan sebagai kantor KIM. Kami sebagai pihak kelurahan sangat mendukung keberadaan KIM. Oleh karena itu, apapun yang bisa kami bantu untuk memudahkan KIM dalam melaksanakan kegiatannya, pihak kelurahan dengan senang hati akan membantu”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 16.00 WIB di Kantor Kelurahan Tlogomas)

Selanjutnya, pernyataan dari Ibu Endang Setyaningrum selaku masyarakat Kelurahan Tlogomas berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Menempatkan kantor KIM di kelurahan memudahkan masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi tentang kegiatan KIM. Selain itu, kelurahan sendiri merupakan pusat kegiatan administratif di Kelurahan Tlogomas tentunya KIM lebih mudah untuk melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kantor Kelurahan Tlogomas)

Kegiatan selanjutnya adalah dengan membuat blog tentang KIM Tlogomas. KIM Tlogomas dalam kaitannya sebagai wadah layanan informasi bagi masyarakat menjadikan internet sebagai salah satu media penyampai informasi, khususnya dalam bentuk blog. Dengan alamat blog <http://kimtlogomasmalang.wordpress.com>, blog KIM Tlogomas dibuat dalam rangka mempermudah masyarakat Tlogomas khususnya dan masyarakat secara luas dalam mengakses informasi secara *on-line*. Blog KIM Tlogomas memuat segala bentuk aktivitas KIM, selain itu juga memuat berbagai informasi seputar Kelurahan Tlogomas termasuk potensi wilayah yang dimiliki oleh Kelurahan Tlogomas seperti situs sejarah, sosial budaya, religius, perekonomian, dan produk unggulan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Pantja :

“Blog KIM Tlogomas dikelola oleh anggota KIM Tlogomas untuk memberikan informasi terbaru tentang segala aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh KIM Tlogomas, informasi seputar Kelurahan Tlogomas, termasuk potensi yang dimiliki Kelurahan Tlogomas. Masyarakat dapat memberikan informasi, saran, dan kritiknya melalui blog tersebut, sehingga KIM dapat mengetahui apa

saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Tlogomas. Blog ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat Tlogomas khususnya serta masyarakat luas pada umumnya untuk dapat mengetahui berbagai informasi mengenai KIM Tlogomas dan berbagai informasi seputar Kelurahan Tlogomas”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Endang Setyaningrum selaku masyarakat Kelurahan Tlogomas berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Selain dengan langsung datang ke Kantor KIM Tlogomas yang berada di Kelurahan Tlogomas, masyarakat luas khususnya masyarakat Tlogomas juga dipermudahkannya untuk mengakses informasi tentang segala aktivitas KIM dengan mengunjungi blog KIM Tlogomas. Sehingga masyarakat bisa mengakses informasi tanpa ada hambatan tempat ataupun waktu, karena informasi tentang KIM yang diakses melalui blog dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Namun, apabila masyarakat tidak dapat mengakses informasi melalui blog, masyarakat tetap bisa mendapatkannya dengan datang ke kantor KIM”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kantor Kelurahan Tlogomas)



Gambar 4. 4 Tampilan Blog KIM Tlogomas

Sumber : Blog KIM Tlogomas <https://kimtlogomas.wordpress.com/>

Selanjutnya, agar seluruh anggota KIM Tlogomas dan masyarakat Tlogomas secara luas dapat mengakses informasi secara *on-line* termasuk mengakses informasi melalui blog yang telah dibuat, dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam

bidang informasi. Kegiatan pelatihan tersebut antara lain melalui kegiatan pengenalan, pembuatan, dan modifikasi blog. Kegiatan pelatihan dilakukan oleh KIM bekerjasama dengan Diskominfo Kota Malang dan DPPM Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dalam pelatihan ini disampaikan materi mengenai kriteria web yang efektif, kejelasan misi organisasi (*mission organization*), siapa pengunjung web (*the visitors*), *design* web yang sesuai, berita dan jadwal kegiatan, yang kesemuanya mengacu pada permasalahan mengapa web kurang *update*, berjalan lambat, dan pencitraan pengguna web. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam bidang informasi, KIM melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan antara lain melalui kegiatan pengenalan, pembuatan, dan modifikasi blog. Pelatihan dapat diikuti oleh anggota maupun masyarakat Tlogomas yang ingin lebih mengenal konten blog lebih mendalam. Pelatihan dilakukan bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), selain digunakan sebagai tempat pelatihan juga sebagai pihak penyedia sarana pelatihan. Namun, karena keterbatasan tempat dan sarana pelatihan ini hanya terbatas untuk beberapa orang. Kegiatan ini tentu saja sangat penting dan bermanfaat, mengingat web sangat besar perannya sebagai media penyebar informasi. Oleh karenanya KIM Tlogomas dalam pencapaian tujuan meningkatkan SDM masyarakat Tlogomas terus menjalin kerjasama dan sinergitas yang baik dengan semua pihak”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Pernyataan tersebut dipertegas oleh pernyataan dari Bapak Bambang selaku Kabid SKDI Diskominfo Kota Malang yaitu sebagai berikut :

“Diskominfo meminta bantuan kepada para relawan TIK dalam hal ini juga merupakan binaan Diskominfo bidang Pos dan Telekomunikasi (POSTEL) untuk menjadi pengajar dalam kegiatan pelatihan :

pengenalan, pembuatan, dan modifikasi blog sebagai salah satu program kerja dari KIM Tlogomas. Diharapkan dengan kegiatan pelatihan ini pengetahuan dan kemampuan SDM dalam bidang informasi dan pengelolaan blog semakin meningkat”. (Wawancara pada hari 16 Februari 2015 pukul 10.00 WIB di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dyah selaku masyarakat Kelurahan Tlogomas yang mengikuti pelatihan pengelolaan konten blog berdasarkan wawancara sebagai berikut :

“Iya, benar saya salah satu yang mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan konten blog yang diadakan oleh KIM Tlogomas bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dalam pelatihan tersebut saya diberikan pengetahuan tentang pengenalan, pembuatan, dan modifikasi blog. Dengan adanya kegiatan pelatihan ini sangat membantu saya dalam menambah pengetahuan dan kemampuan saya dalam pengelolaan blog. Saya harapkan kegiatan pelatihan seperti ini dilakukan secara rutin dan harapan saya di kegiatan pelatihan selanjutnya fasilitas dan sarananya di tambah sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak peserta”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kantor Kelurahan Tlogomas)



Gambar 4. 5 Pelatihan Pengenalan Konten Blog kepada anggota KIM dan perwakilan masyarakat Tlogomas

Sumber : Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2014

Program kerja kedua adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi berkaitan tentang KIM Berbasis Potensi Wilayah. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui berbagai potensi yang dimiliki oleh wilayah Kelurahan Tlogomas yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Program kerja yang kedua ini bermaksud mengajak masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah. Dengan keterlibatan masyarakat Tlogomas dalam berbagai kegiatan KIM dapat meningkatkan kualitas SDM masyarakat Tlogomas. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut:

“Kegiatan sosialisasi berkaitan dengan KIM Berbasis Potensi Wilayah kepada masyarakat Tlogomas dilakukan oleh KIM karena masyarakat lebih suka dan mengena jika dilakukan pendekatan fisik seperti penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, dan lain-lain yang sifatnya KIM secara langsung harus terjun ke lapangan. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Tlogomas mau terlibat dalam berbagai kegiatan KIM dan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh wilayah Kelurahan Tlogomas secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Pernyataan tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Widodo selaku masyarakat Kelurahan Tlogomas berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Iya, benar, masyarakat Tlogomas diberikan sosialisasi berkaitan tentang KIM Berbasis Potensi Wilayah. Masyarakat Tlogomas antusias dengan kegiatan sosialisasi tersebut. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat Tlogomas dapat mengetahui berbagai

potensi yang dimiliki oleh wilayah Tlogomas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Tlogomas)



Gambar 4. 6 Sosialisasi berkaitan dengan KIM Berbasis Potensi Wilayah kepada masyarakat Tlogomas
Sumber : Dokumentasi KIM Tlogomas Kota Malang, 2014

Selain dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media televisi. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas dapat lebih mengenal peranan KIM. Masyarakat dapat melihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KIM dengan melihat tayangan pada salah satu stasiun televisi lokal yaitu Malang TV dengan judul acara “Mengetahui Malang Bersama KIM” yang tayang pada setiap hari Minggu pukul 12.00 WIB. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut :

“Mengetahui Malang Bersama KIM adalah judul acara yang digagas oleh Diskominfo Kota Malang bekerjasama dengan stasiun televisi lokal Malang TV dalam mensosialisasikan peranan KIM di masyarakat secara luas. Acara yang ditayangkan setiap hari Minggu pukul 12.00 wib ini menjadi media penyebaran informasi paling efektif dan menarik karena dikemas secara apik dan kreatif. Dimana digambarkan bagaimana peranan KIM dalam melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama membangun penyebaran

informasi mengenai potensi sebuah wilayah untuk dimanfaatkan secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Pernyataan tersebut dipertegas oleh pernyataan dari Bapak Bambang selaku Kabid SKDI Diskominfo Kota Malang yaitu sebagai berikut :

“Rapat koordinasi pembahasan persiapan syuting diadakan pada tanggal 8 April 2014. Dinas Kominfo selaku penggagas acara, pihak Malang TV, perwakilan dari kecamatan Lowokwaru, perwakilan dari kelurahan Tlogomas, serta ketua KIM Tlogomas, dan perwakilan dari masyarakat Tlogomas, hadir dalam rapat pembahasan tersebut. KIM Tlogomas yang mendapat kehormatan untuk tampil perdana berusaha maksimal dalam mensukseskan acara tersebut. Hingga Selasa, tanggal 15 April 2014 dengan melibatkan banyak pihak, diantaranya Walikota Malang H. M. Anton, Camat Lowokwaru, Lurah Tlogomas, Kepala Dinas Kominfo, Umi Farida selaku ketua penggerak PKK Kota Malang, para sesepuh dan seluruh masyarakat Tlogomas terlibat aktif dalam mensukseskan acara perdana ini. Hasil dari kegiatan syuting ini ditayangkan di Malang TV mulai tanggal 20 April 2014 pukul 12.00 WIB. Meski dalam penayangannya masih banyak kekurangan disana sini, namun semangat untuk mensosialisasikan peranan KIM, fungsi, dan manfaatnya, terus dilakukan hingga masyarakat benar benar paham dan ikut bersama sama membangun penyebaran informasi potensi sebuah wilayah untuk dimanfaatkan secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara pada hari 16 Februari 2015 pukul 10.00 WIB di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)



Gambar 4. 7 Proses syuting Mengenal Malang Bersama KIM

Sumber : Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2014

Program kerja selanjutnya adalah mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi terkait baik regional maupun nasional, khususnya instansi Pembina yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Salah satu kegiatannya adalah melakukan *study banding* bidang administrasi pada KIM baik yang berada di Kota Malang maupun di kota lainnya yang sudah berjalan. KIM Tlogomas dengan konsep berbasis potensi wilayah relatif baru berjalan dibanding sembilan KIM lainnya yang telah dibentuk sebelumnya di Kota Malang. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut :

“Kegiatan *study banding* baik yang dilakukan di KIM yang ada di Kota Malang maupun *study banding* pada KIM yang ada di kota lainya diharapkan dapat menambah wawasan dalam menjalankan dan mengembangkan KIM Tlogomas ke depannya agar lebih baik. Selain itu, kegiatan *study banding* yang dilakukan dapat saling berbagi pengalaman antar KIM sekaligus menambah koneksi”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Bambang selaku Kabid SKDI Diskominfo Kota Malang yaitu sebagai berikut:

“Dinas Kominfo Kota Malang melalui Bidang SKDI memfasilitasi kegiatan *study banding* baik yang dilakukan di KIM yang ada di Kota Malang maupun *study banding* pada KIM yang ada di kota lainya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menambah wawasan dalam menjalankan dan mengembangkan KIM ke depannya agar lebih baik. Baik KIM maupun SKDI dapat memperoleh banyak pelajaran dari kegiatan *study banding* yang dilakukan”. (Wawancara pada hari 16 Februari 2015 pukul 10.00 WIB di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)



Gambar 4. 8 *Study banding* KIM Tlogomas bersama Diskominfo Kota Malang

Sumber : Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2014

Kegiatan selanjutnya adalah mengikuti berbagai acara pameran produk, khususnya produk-produk unggulan yang ada di Kelurahan Tlogomas. Kegiatan pameran produk-produk yang merupakan hasil dari KIM dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Malang yang diikuti semua KIM yang ada di Kota Malang termasuk KIM Tlogomas. Kegiatan pameran produk semacam ini dapat memperkenalkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat secara luas. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut :

“Dengan adanya kegiatan pameran produk yang diadakan oleh Dinas Kominfo Kota Malang melalui Bidang SKDI sangat membantu untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan yang dimiliki KIM khususnya KIM Tlogomas kepada masyarakat secara luas. Kegiatan ini dilakukan enam bulan sekali di Malang Olympic Garden (MOG) Untuk pertama kalinya KIM Tlogomas mengikuti kegiatan tersebut, KIM Tlogomas memamerkan hasil budidaya jamur sebagai produk unggulan yang dimiliki oleh KIM Tlogomas”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak

Bambang selaku Kabid SKDI Diskominfo Kota Malang yaitu sebagai berikut:

”Kegiatan pameran produk yang diadakan oleh Dinas Kominfo Kota Malang melalui Bidang SKDI dilakukan secara rutin enam bulan sekali di Malang Olympic Garden (MOG) sejak tahun 2012. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan KIM di Kota Malang tidak terkecuali KIM Tlogomas. Kegiatan ini sebagai wadah untuk memperkenalkan produk unggulan KIM kepada masyarakat sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal produk-produk yang dihasilkan oleh KIM yang nantinya dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh KIM. (Wawancara pada hari 16 Februari 2015 pukul 10.00 WIB di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)



Gambar 4. 9 Pameran produk unggulan KIM Tlogomas
Sumber : Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2014

Kegiatan lainnya adalah mengikuti Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCKK). KIM suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu fungsi KIM sebagai sumber informasi dalam mengembangkan dan meningkatkan informasi pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup dalam rangka menyejahterahkan masyarakat. LCKK adalah salah satu bentuk pembinaan KIM yang merupakan pengejawatan atau revitalisasi dan reaktualisasi dari “kelompok capir” yang

disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Bambang selaku

Kabid SKDI Diskominfo Kota Malang yaitu sebagai berikut :

“Lomba LCKK untuk anggota KIM diadakan Dinas Kominfo Prov. Jatim dengan harapan agar antar KIM dapat berkomunikasi dengan intensif melalui fasilitas yang ada dengan mengoptimalkan peran dari 36 telecenter yang ada di kab/kota di Jatim. Penilaian dalam lomba LCKK adalah didasarkan dari dua unsur, yakni verifikasi administrasi sebesar 50% dan unsur cerdas cermat juga 50%”.(Wawancara pada hari 16 Februari 2015 pukul 10.00 WIB di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa KIM sebagai saluran informasi yang berguna dalam pemberdayaan masyarakat. Program kerja yang dilaksanakan oleh KIM Tlogomas terdiri dari beberapa program, program kerja yang pertama adalah membuat masyarakat Kelurahan Tlogomas menjadi masyarakat yang sadar akan informasi, program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akses informasi masyarakat Tlogomas. Program kedua adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelurahan Tlogomas dan program kerja yang ketiga adalah mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait baik nasional maupun regional. Program kerja kedua dan ketiga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program dan inisiatif pembangunan daerah. Dalam melaksanakan program kerja KIM Tlogomas terdapat beberapa aktor yang terlibat yaitu dari pihak

pemerintah terdiri dari Dinas Kominfo Kota Malang, Dinas Kominfo Prov. Jatim, Kelurahan Tlogomas, instansi swasta (Malang TV), Perguruan Tinggi (DPP UMM) dan masyarakat Kelurahan Tlogomas. KIM Tlogomas menjalin kerjasama dengan pihak manapun asalkan satu tujuan yaitu kepentingan bersama.

c. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah dalam Memberdayakan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas ditentukan sesuai potensi yang dimiliki wilayah Kelurahan Tlogomas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan unit ekonomi atau bisnis masyarakat dan wilayah Kelurahan Tlogomas. Penentuan kegiatan pemberdayaan diserahkan sepenuhnya kepada KIM dan warga binaan di Kelurahan Tlogomas sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang dinilai dapat dioptimalkan oleh masyarakat Tlogomas adalah mengembangkan budidaya jamur menjadi abon jamur. Kegiatan tersebut merupakan usulan dari ketua KIM yang kemudian disetujui oleh warga binaan di Kelurahan Tlogomas. Sebelumnya budidaya jamur telah dijadikan sebagai industri di Kelurahan Tlogomas. Salah satu tempat yang menekuni budidaya jamur di Kelurahan Tlogomas terletak di RW 02 dan RW 03. Membudidayakan jamur konsumsi, khususnya jamur kuping, jamur tiram dan jamur merang mendatangkan keuntungan yang sangat menggiurkan. Budidaya jamur dinilai cukup mudah dilakukan dan tidak membutuhkan lahan

yang luas seperti budidaya tanaman lainnya. Hal ini dinilai cocok untuk dilakukan di Kelurahan Tlogomas yang mayoritas lahannya adalah untuk pemukiman dan kawasan industri, sehingga sangat minim lahan yang bisa digunakan untuk budidaya tanaman. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut :

“KIM menilai budidaya jamur yang sudah cukup lama ditekuni oleh masyarakat Tlogomas merupakan potensi yang dapat dikembangkan secara optimal. Selain dinilai mudah, budidaya jamur tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga cocok untuk diterapkan di Kelurahan Tlogomas yang minim lahan. Untuk itu KIM dan masyarakat Tlogomas yang menjadi anggota binaan KIM memikirkan bagaimana caranya budidaya jamur yang telah ada dapat dimanfaatkan lebih optimal dan dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dengan mengembangkan budidaya jamur ini menjadi produksi abon jamur”. (Wawancara hari Selasa tanggal 2 Maret 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)



Gambar 4. 10 Budidaya Jamur Kelurahan Tlogomas
Sumber : Dokumentasi KIM Tlogomas Kota Malang, 2014

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan usaha budidaya jamur yang hanya menghasilkan makanan mentah menjadi makanan jadi atau siap saji yaitu abon jamur disambut baik oleh masyarakat Tlogomas. Bekerjasama dengan beberapa pemilik usaha

budidaya jamur yang ada di Kelurahan Tlogomas, untuk mengembangkan usahanya dengan menjadikan hasil budidaya jamurnya menjadi bahan baku produksi abon jamur. Selain diharapkan dapat meningkat nilai jual, mengembangkan budidaya jamur menjadi produksi abon jamur dapat sebagai wadah pemberdayaan masyarakat Tlogomas. Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Samsul warga RW 02 selaku pemilik usaha budidaya jamur sebagai berikut :

“Saya sebagai salah satu pemilik usaha budidaya jamur di Kelurahan Tlogomas menyambut baik niat KIM untuk mengembangkan usaha budidaya jamur yang sudah ada menjadi produksi abon jamur. Hal tersebut saya harapkan dapat sebagai solusi dari permasalahan saya sebagai pemilik usaha budidaya jamur, seperti saat produksi jamur sedang banyak dan melebihi permintaan harga jamur di pasaran mengalami penurunan yang terkadang menyebabkan kerugian bagi kami para budidaya jamur karena hasil penjualan jauh di bawah biaya produksi. Untuk itu dengan adanya kegiatan yang dilakukan KIM ini saya harapkan dapat menambah nilai jual jamur dari makanan mentah menjadi makanan jadi yakni abon jamur, dengan begitu kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Tlogomas yang tidak bekerja atau untuk mengisi waktu luang agar lebih produktif. Asalkan kami pemilik usaha dan masyarakat dibina sepenuhnya oleh KIM sekaligus difasilitasi KIM, yang kami miliki hanya hasil produksi budidaya jamur tersebut yang terdiri dari 1000 log jamur”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Tlogomas)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Udin RW 03 selaku pemilik usaha budidaya jamur sebagai berikut :

“Saya setuju dengan kegiatan KIM untuk mengembangkkan usaha produksi abon jamur. Saya sebagai salah satu pemilik usaha budidaya jamur akan mendukung dengan menyediakan bahan baku produksi yang merupakan hasil budidaya jamur yang saya miliki yaitu 1000 log jamur. Asalkan KIM benar-benar komitmen untuk mengembangkan usaha budidaya jamur ini dan untuk memberdayakan masyarakat

Tlogomas. Asalkan kami pemilik usaha tidak dibebankan dengan biaya-biaya lain seperti membayar pekerja dan fasilitas kegiatan. Karena ini kegiatan KIM saya harap KIM bertanggung jawab penuh.” (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Tlogomas)

Setelah terjalin kerjasama antara KIM dengan pemilik usaha budidaya jamur, selanjutnya adalah melakukan kegiatan pembinaan-pembinaan berupa sosialisasi maupun pelatihan kepada warga binaan di Kelurahan Tlogomas. Kegiatan ini selain digunakan untuk mengembangkan usaha budidaya jamur masyarakat Tlogomas menjadi produksi abon jamur, juga memberdayakan masyarakat Tlogomas agar lebih produktif. Untuk mengembangkan usaha masyarakat Tlogomas agar menuju keswadayaan atau kemandirian, maka diperlukan pembinaan secara terpadu berupa bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah dalam hal ini Kelurahan Tlogomas. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan dalam hal ini KIM menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Tlogomas. Kegiatan pelatihan yang diberikan kepada warga binaan Kelurahan Tlogomas terdiri dari pembuatan abon jamur, cara mengemas produk dan pembuatan kemasan produk serta pembinaan di bidang pemasaran produk. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut :

“Untuk kegiatan ini KIM bekerjasama dengan berbagai pihak, selain menjalin kerjasama dengan pemilik usaha budidaya jamur KIM juga bekerjasama dengan pihak kelurahan dapat memfasilitasi KIM Tlogomas dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan KIM. Selain itu untuk kegiatan pelatihan

KIM bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Tlogomas. Diharapkan dengan adanya kerjasama yang terjalin antara KIM dengan berbagai pihak dapat mensukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Pernyataan dari Ibu Ani warga Kelurahan Tlogomas selaku warga binaan KIM Berbasis Potensi Wilayah :

“Iya benar mbak saya termasuk dari warga binaan di Kelurahan Tlogomas yang mengikuti pelatihan pembuatan abon jamur. Kami sangat senang mendapat kegiatan pelatihan ini. Sebelumnya saya hanya seorang ibu rumah tangga, dengan adanya kegiatan pelatihan bisa saya gunakan untuk mengisi waktu luang dan membuat saya lebih produktif sehingga hasilnya dapat saya gunakan untuk membantu perekonomian keluarga”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Tlogomas)



Gambar 4. 11 Produksi Abon Jamur

Sumber : Dokumentasi KIM Tlogomas Kota Malang, 2014

Selanjutnya, selain melakukan pengembangan unit ekonomi atau bisnis masyarakat dan wilayah melalui pengembangan usaha budidaya jamur

menjadi abon jamur. KIM Tlogomas juga membangun *web server* khusus dalam pengelolaan ekonomi masyarakat dan wilayah. Untuk memasarkan hasil produksi abon jamur selain menggunakan cara tradisional seperti dititipkan di toko-toko yang ada di Kelurahan Tlogomas, KIM juga berperan memasarkan melalui blog KIM Tlogomas sebagai produk unggulan KIM Tlogomas agar lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. KIM Tlogomas membuatkan web dengan alamat www.alianifood.com untuk memudahkan pemesanan produk jamur abon bagi masyarakat, baik masyarakat di Kota Malang maupun di luar Kota Malang.

Memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki Kelurahan Tlogomas dengan mengembangkan usaha budidaya jamur menjadi produksi abon jamur, selain kegiatan ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat Tlogomas, kegiatan ini juga dapat meningkatkan nilai tambah di bidang ekonomi masyarakat Tlogomas. Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Samsul warga RW 02 selaku pemilik usaha budidaya jamur sebagai berikut :

“Kegiatan produksi abon jamur ini menambah pemasukan bagi saya sebagai pemilik usaha budidaya jamur. Dari empat log bisa menghasilkan 1 kg jamur dengan harga kisaran Rp. 15.000. Jika memiliki 1000 log sekali panen dapat menghasilkan 250 kg jamur dengan harga Rp. 3.750.000. Setelah diolah menjadi abon jamur dengan harga jual Rp. 17.000 per-100gram maka pemasukan bersih sekali produksi bisa mencapai Rp. 10.000.000 yaitu 3x lipat dari penjualan jamur mentah. Sementara modal dari satu log jamur hanya membutuhkan dana Rp. 2000 ”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Tlogomas)

Setelah kegiatan ini berjalan, selain memberi keuntungan bagi para pemilik usaha budidaya jamur. Masyarakat Tlogomas yang diberdayakan melalui kegiatan ini juga mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Ani warga Kelurahan Tlogomas selaku warga binaan KIM Berbasis Potensi Wilayah :

“Dari kegiatan ini, saya yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga yang tidak memiliki pemasukan. Setelah ikut menjadi warga binaan KIM Tlogomas dan aktif dalam kegiatan ini saya bisa memperoleh pemasukan sekitar Rp. 400.000 sampai Rp. 600.000 per-bulan. Hasil dari kegiatan ini dapat saya gunakan untuk membantu perekonomian keluarga”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Tlogomas)

Penjelasan tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Pantja selaku ketua KIM Tlogomas sebagai berikut :

“Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan potensi unit ekonomi atau bisnis masyarakat dan wilayah dengan mengembangkan usaha budidaya jamur menjadi usaha produksi abon jamur yang dilakukan KIM Tlogomas sebagai strategi pengelolaan KIM Berbasis Potensi Wilayah. Hal tersebut sebagai bentuk transformasi KIM selain sebagai lembaga pengelola dan penyedia informasi, juga sebagai inkubator dan fasilitator dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi wilayah dalam hal ini khususnya wilayah Kelurahan Tlogomas”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 WIB di Kantor KIM Tlogomas)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki wilayah Kelurahan Tlogomas yaitu dengan mengembangkan unit ekonomi atau bisnis masyarakat dan wilayah melalui pengembangan usaha budidaya jamur menjadi usaha produksi abon

jamur. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM Kelurahan Tlogomas dan juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kelurahan Tlogomas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan apapun tidak terkecuali dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Pendukung yaitu merupakan suatu hal yang dapat membantu dan memperlancar proses pelaksanaan. Hal yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a) Dari Segi Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Tlogomas melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas, KIM Tlogomas memiliki anggota yang profesional yaitu yang terdaftar dalam susunan keanggotaan KIM Tlogomas. Selain itu telah ditetapkan struktur organisasi yang baik sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut anggota juga menetapkan sifat keterbukaan dan keramahan. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Pantja selaku Ketua KIM sebagai berikut :

“KIM Tlogomas memiliki anggota yang profesional yaitu yang terdaftar dalam susunan keanggotaan KIM Tlogomas. Selain itu telah ditetapkan struktur organisasi agar anggota dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya ketimpangan kewenangan”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 di Kelurahan Tlogomas)

2. Faktor Eksternal

a) Dukungan dan Kerjasama yang Terjalin antara KIM Tlogomas dengan pihak Kelurahan Tlogomas.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Tlogomas melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas tidak lepas dari adanya dukungan pihak Kelurahan Tlogomas. Dukungan pihak kelurahan dengan memberikan

salah satu ruangan di kelurahan untuk dijadikan sebagai kantor KIM. Selain itu apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan, KIM dapat meminta bantuan pada pihak kelurahan untuk membantu menyelesaikannya. Pihak kelurahan juga menjadi pengawas KIM dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga apabila KIM melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas maka pihak Kelurahan Tlogomas dapat melaporkan pada Diskominfo Kota Malang untuk memberikan teguran atau peringatan pada KIM selanjutnya meluruskan kembali penyimpangan tersebut, sehingga KIM dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tetap terkontrol dengan baik. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Pantja selaku Ketua KIM sebagai berikut :

“Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Tlogomas melalui KIM tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh pihak Kelurahan Tlogomas yang memberikan salah satu ruangan di kelurahan untuk digunakan sebagai kantor KIM. Selain itu kerjasama yang terjalin antara KIM dengan pihak kelurahan yaitu Kelurahan Tlogomas dimana tempat KIM Tlogomas berada sebagai pengawas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh KIM”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 di Kelurahan Tlogomas)

Dilihat dari penjelasan di atas dukungan dari pihak Kelurahan Tlogomas cukup besar. Selain itu, kerjasama yang terjalin antara KIM dengan Kelurahan Tlogomas terjalin dengan baik, sehingga dapat membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas berjalan dengan baik pula.

b) Antusias dan Partisipasi Masyarakat Tlogomas

Antusias dan partisipasi masyarakat Tlogomas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas dapat dilihat dari ketersediaan masyarakat secara sukarela untuk menjadi anggota KIM baik anggota struktural yang bertugas menjalankan KIM dan masyarakat yang menjadi anggota binaan KIM untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat seperti RT, RW, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta pemuda dan pemudi Karang Taruna yang ada di Kelurahan Tlogomas sangat membantu sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelurahan Tlogomas dapat diterima masyarakat. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Pantja selaku Ketua KIM sebagai berikut :

“Antusias dan partisipasi masyarakat Tlogomas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui KIM sangatlah besar. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan masyarakat secara sukarela menjadi anggota structural KIM maupun masyarakat yang menjadi anggota binaan KIM. Masyarakat Tlogomas dinilai aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh KIM. Keterlibatan berbagai tokoh masyarakat juga merupakan bentuk partisipasi yang diperlihatkan oleh masyarakat

Tlogomas". (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 di Kelurahan Tlogomas)

Dilihat dari penjelasan di atas antusias dan partisipasi masyarakat Tlogomas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dari warga yang secara sukarela menjadi anggota, masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan berbagai tokoh masyarakat sehingga KIM dapat diterima oleh masyarakat Tlogomas.

b. Faktor Penghambat

Dalam setiap pelaksanaan pemberdayaan pasti terdapat penghambat yaitu berupa masalah-masalah yang muncul di awal maupun di tengah-tengah pelaksanaan. Hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a) Komitmen dari Anggota

Pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas komitmen dari masing-masing anggota sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Namun dalam hal ini,

komitmen dari anggota khususnya anggota struktural KIM sebagai pengurus dan pelaksana masih kurang. Kurang aktifnya sebagian anggota KIM. Selain itu, KIM tidak memiliki *time schedule* yang jelas untuk beberapa kegiatan. Tidak jarang juga jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan tidak terlaksana. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Pantja selaku Ketua KIM sebagai berikut :

“Selama ini yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui KIM yaitu kurang kuatnya komitmen dari masing-masing anggota. Hanya sebagian anggota yang aktif dan yang lainnya kurang aktif, karena sebagian memilih aktif pada kegiatan masing-masing. Dikarenakan hal tersebut beberapa anggota kalau diundang untuk pertemuan atau rapat tidak dapat hadir dikarenakan ada keperluan. Tidak jarang juga sebagian anggota tidak datang dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KIM. Hambatan lainnya KIM tidak memiliki *time schedule* yang jelas untuk beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan tidak jarang jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan karena berbagai alasan”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 di Kelurahan Tlogomas)

Dilihat dari penjelasan di atas komitmen dari masing-masing anggota masih kurang dan belum sesuai dengan tugasnya. Sehingga menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas belum optimal.

2. Faktor Eksternal

a) Dari Segi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Masih ada masyarakat yang belum bisa memanfaatkan perkembangan IPTEK secara optimal terutama dalam memperoleh berbagai informasi yang dapat menunjang pengetahuan mereka karena sebagian besar masyarakat yang menjadi anggota binaan adalah ibu-ibu. Kurangnya kemampuan masyarakat di bidang IPTEK merupakan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Pantja selaku Ketua KIM sebagai berikut :

“Masih ada masyarakat yang belum bisa memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal. Selain dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki juga dikarenakan keterbatasan akses. Tidak semua orang memiliki *gadget* untuk mengakses informasi secara *online* dan tidak semua orang yang memiliki akses menggunakannya untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat menunjang pengetahuan mereka hanya digunakan untuk *facebook-an*, *twitter-an*, dll”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 di Kelurahan Tlogomas)

Dari penjelasan di atas peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah sangatlah diperlukan. Dimana proses pemberdayaan masyarakat melalui proses peningkatan kesadaran akan pentingnya informasi, peningkatan akses, dan pemberdayaan dengan pendayagunaan informasi dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Tlogomas dengan mengembangkan potensi yang ada di wilayah

Tlogomas. Diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan IPTEK.

b) Sosial-Budaya Masyarakat

Masyarakat Tlogomas memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga berbeda-beda. Tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas belum bisa memenuhi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat Tlogomas. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Pantja selaku Ketua KIM sebagai berikut :

“Faktor sosial budaya tidak dapat diabaikan karena masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda sehingga memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Tidak dipungkiri KIM belum bisa memenuhi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat Tlogomas. Akan tetapi, KIM akan terus berbenah diri agar dapat secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat Tlogomas meskipun tidak semua”. (Wawancara hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pukul 15.00 di Kelurahan Tlogomas)

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat itu sendiri dibedakan menjadi faktor internal dan

eksternal. Faktor pendukung internalnya adalah dari segi SDM dan faktor pendukung eksternal terdiri dari dukungan dan kerjasama yang terjalin antara KIM Tlogomas dengan pihak Kelurahan Tlogomas selain itu adalah antusias dan partisipasi masyarakat Tlogomas. Sedangkan faktor penghambat internalnya adalah komitmen dari para anggota dan faktor penghambat eksternalnya adalah dari segi IPTEK selain itu Sosial-Budaya Masyarakat Kelurahan Tlogomas.

C. Analisis

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas.

a. Proses Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh KIM Tlogomas dapat dilihat dalam pengertian pemberdayaan menurut Ife (1995) yang mengatakan bahwa pemberdayaan mengacu pada *empowerment* yang berarti pemberian kekuasaan atau pemberian kekuatan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Sejalan dengan pendapat Swift dan Levin (1987) dan Rappaport (1984) dalam Fahrudin (2011) bahwa *empowerment* sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (*reallocation of power*) sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan dapat berkuasa atas kehidupannya. Segala potensi yang

dimiliki oleh pihak atau orang-orang yang tidak beruntung itu ditumbuhkan dan dikembangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya. dimana pemberdayaan melalui KIM Tlogomas dilakukan oleh kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat, pada dasarnya merupakan pihak yang tidak beruntung atau tidak berdaya kemudian diarahkan agar dapat menguasai kehidupannya secara mandiri. Untuk itu, tahap sosialisasi diperlukan untuk mengetahui manfaat KIM bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Tlogomas.

Selanjutnya, dalam proses pelaksanaan KIM Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas, pada tahap pembentukan masyarakat dipilih menjadi pimpinan kolektif untuk mengurus KIM, dari hasil rapat ditetapkan Pantjawati Yustikarini, S.Sos sebagai Ketua KIM Tlogomas selanjutnya KIM secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Program Kerja dan Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas

Kiefer (1981) dalam Fahrudin (2011) mengemukakan tentang tiga dimensi yang berkaitan dengan makna *empowerment* adalah kompetensi kerakyatan (*citizenship competence*), tidak buta atau melek sosiopolitik (*sociopolitical literacy*) dan kompetensi partisipasi (*participatory competence*). Kompetensi-kompetensi di atas dipengaruhi oleh sikap personal atau perasaan diri sehingga mendorong secara aktif untuk berkembang secara sosial, pengetahuan dan

kapasitas untuk menganalisis secara kritis sistem sosial dan politik sehingga mengerti dan memahami keadaan lingkungannya. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas adalah memanfaatkan semua kekayaan meliputi sumber daya non fisik seperti sosial, budaya, ekonomi dan sumber daya fisik pada area atau wilayah Tlogomas sehingga dapat dikembangkan menjadi kekuatan tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan sesuatu. Oleh karena itu, dari ketiga dimensi *empowerment* yang telah disebutkan oleh Kiefer meliputi kompetensi kerakyatan, melek sosiopolitik, dan kompetensi partisipasi telah diterapkan pada KIM Tlogomas dalam pemberdayaan masyarakat.

Kompetensi kerakyatan dapat dilihat dari program kerja KIM Tlogomas, segala aktivitas atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dibuat berdasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Tlogomas dengan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang dimiliki. Selain berdasarkan kebutuhan masyarakat, program kerja KIM Tlogomas dibuat untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Tlogomas. Selanjutnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga untuk mengedukasi masyarakat agar melek sosiopolitik dengan memanfaatkan dan mengelola informasi, dalam hal ini masyarakat tidak hanya diedukasi untuk melek sosiopolitik akan tetapi juga melek akan teknologi. Kompetensi partisipasi dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Tlogomas yang secara aktif menjadi anggota struktural KIM Tlogomas maupun aktif dalam berbagai aktivitas atau kegiatan

KIM Tlogomas. Selain itu, partisipasi dapat dilihat dari berbagai aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas.

Kemampuan untuk mengembangkan strategi kegiatan dan kemampuan melakukan penggunaan maupun melakukan penataan sumber-sumber adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kerangka mencapai tujuan kolektif. Pemberdayaan yang dilakukan oleh KIM Tlogomas bertujuan ke arah perubahan sosial yang ada, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik maupun non fisik seperti menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Fahrudin (2011) beberapa ahli menganggap bahwa *empowerment* umumnya dilakukan secara kolektif sehingga strateginya juga harus bersifat kolektif. Akan tetapi dalam beberapa situasi, strategi *empowerment* dapat dilakukan secara *eksklusif* atau tersendiri yang pada gilirannya tetap berkaitan dengan kolektivitas.

a. Mikro

Pemberdayaan dilakukan pada klien secara individu, dengan teknik konseling, bimbingan, manajemen stres, dan intervensi krisis. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas atau *task centered approach*. Dalam hal ini,

KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas telah melalui tahapan yang sudah diberikan bimbingan maupun bekal pelatihan dari pemerintah dalam hal ini Diskominfo Kota Malang melalui bidang SKDI untuk tugas individu para pengurus KIM (anggota struktural), agar setiap individu mampu menjalankan tugas-tugasnya. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap individu dapat meminimalisir kesalahan dalam menjalankan tugas dan dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

b. Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok, digunakan sebagai teknik yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap agar dapat mengatasi masalah sendiri dan kelompok. Dalam hal ini, KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas telah melalui tahapan ini. KIM Tlogomas sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar KIM bertindak sebagai media intervensi bagi masyarakat Kelurahan Tlogomas dalam menentukan kebijakan untuk pemecahan masalah yang dihadapi baik masalah yang bersifat internal maupun eksternal.

c. Makro

Pendekatan ini sering disebut sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan

yang lebih luas. Kebijakan sosial, perencanaan sosial, kampanye, *lobbying*, media massa *appeal*, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik adalah beberapa teknik dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat mempunyai kompetensi untuk memahami situasi - situasi dan untuk menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Tujuan dari pendekatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan performa kinerja/organisasi, perubahan kebijakan, dan perubahan sosio-ekonomi. Dalam hal ini, KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas telah sampai tahap ini. KIM Tlogomas memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan perubahan kebijakan salah satu dari fungsi KIM adalah media perantara antara pemerintah dan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi.

c. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah dalam Memberdayakan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Sumodiningrat (1997) dalam Fahrudin (2011) pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi yang mulanya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat yang berkesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia. Pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki wilayah Kelurahan Tlogomas yaitu pelaksanaan kegiatan mengembangkan usaha budidaya jamur yang hanya menghasilkan makanan mentah menjadi abon jamur sebagai makanan jadi atau siap saji, diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Kelurahan Tlogomas. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Tlogomas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas

Dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Notoatmodjo (1998) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan tersebut terdiri dari :

- a. Faktor Internal terdiri dari :
 - 1) Misi dan Tujuan Organisasi
 - 2) Strategi pencapaian tujuan
 - 3) Sifat dan jenis kegiatan

4) Jenis teknologi yang digunakan

b. Faktor Eksternal terdiri dari :

- 1) Kebijakan Pemerintah
- 2) Sosial - Budaya Masyarakat
- 3) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Berbagai faktor baik internal dan eksternal di atas dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pemberdayaan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang mempengaruhi keberhasilan atau menjadi faktor pendukung internal adalah SDM yang dimiliki KIM Tlogomas. KIM Tlogomas memiliki anggota yang profesional yaitu yang terdaftar dalam susunan keanggotaan KIM Tlogomas. Selain itu telah ditetapkan struktur organisasi yang baik sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut berkaitan dengan misi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi dalam hal ini KIM mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai, untuk itu diperlukan kemampuan dari anggotanya. Selain itu kemampuan anggota juga diperlukan dalam strategi pencapaian tujuan, sehingga strategi yang disusun dapat diperhitungkan dampaknya terhadap organisasi. Sedangkan sifat dan jenis kegiatan KIM Berbasis Potensi Wilayah dalam pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan memanfaatkan informasi dan teknologi. SDM dipersiapkan untuk

mengoprasionalkan teknologi ke hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendukung eksternal dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah adalah dukungan dan kerjasama yang terjalin antara KIM Tlogomas dengan pihak Kelurahan Tlogomas serta antusias dan partisipasi masyarakat Tlogomas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas.

Selain faktor pendukung, dari penelitian yang telah dilakukan juga faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah. Faktor penghambat internal adalah komitmen dari anggota khususnya anggota struktural KIM sebagai pengurus dan pelaksana masih kurang. Sedangkan faktor penghambat eksternal adalah dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Masih ada masyarakat yang belum bisa memanfaatkan perkembangan IPTEK secara optimal terutama dalam memperoleh berbagai informasi yang dapat menunjang pengetahuan. Selain dari segi IPTEK, hambatan eksternal lainnya adalah sosial-budaya masyarakat. Masyarakat Tlogomas memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda-beda sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat juga berbeda-beda. kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga berbeda-beda. Tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas belum bisa memenuhi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat Tlogomas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas Kota Malang dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas.

a. Proses Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu kelembagaan sosial masyarakat yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melalui bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi (SKDI) dengan pengangkatan melalui SK Walikota Malang, yang memiliki wilayah kerja di tingkat kelurahan, sebagai upaya Dinas Kominfo dalam pemberdayaan masyarakat dengan mendorong kelompok-kelompok masyarakat mendayagunakan informasi dan komunikasi agar memberikan nilai tambah bagi

kehidupan masyarakat. KIM Tlogomas merupakan KIM ketiga yang dibentuk di Kecamatan Lowokwaru setelah sebelumnya membentuk KIM Lestari di Kelurahan Tunjungsekar dan KIM Kanuruhan di Kelurahan Dinoyo. KIM Tlogomas adalah KIM pertama di kota Malang yang dibentuk dengan mengimplementasikan konsep “KIM Berbasis Potensi Wilayah” yang digagas oleh Ir. H. Bambang Nugroho selaku Kabid SKDI Diskominfo Kota Malang. Konsep KIM Berbasis Potensi Wilayah adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuannya dengan mengembangkan semua kekayaan atau sumberdaya non fisik maupun fisik yang meliputi rona sosial, budaya, ekonomi dan rona fisik pada area atau wilayah tertentu.

b. Program Kerja dan Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah pada KIM Tlogomas

KIM Tlogomas memiliki beberapa program kerja. Program kerja KIM Tlogomas dibuat berdasar tugas yang telah diamatkan pada KIM Tlogomas. Dalam mewujudkan program kerja, KIM bekerjasama dengan siapapun asalkan satu tujuan yaitu kepentingan bersama. Program kerja KIM Tlogomas memfokuskan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Tlogomas dalam

memajukan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Untuk kegiatan keluar wilayah Tlogomas, KIM mengoptimalkan media blog sebagai alat informasi. Sedangkan untuk kegiatan kedalam wilayah Tlogomas KIM terjun langsung ke masyarakat untuk ikut mendampingi dan memfasilitasi, memberi bimbingan dan pembinaan, dan menjadi mitra kelurahan akan kebutuhan masyarakat Tlogomas.

c. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah dalam Memberdayakan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas ditentukan sesuai potensi yang dimiliki wilayah Kelurahan Tlogomas. Penentuan kegiatan pemberdayaan diserahkan sepenuhnya kepada KIM dan warga binaan di Kelurahan Tlogomas sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang dinilai dapat dioptimalkan oleh masyarakat Tlogomas adalah mengembangkan budidaya jamur menjadi abon jamur. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki wilayah Kelurahan Tlogomas diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Kelurahan Tlogomas. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Tlogomas. Diharapkan kedepannya KIM Tlogomas tidak hanya berhenti dengan

mengembangkan budidaya jamur menjadi abon jamur, tapi kedepannya muncul produk-produk unggulan lainnya yaitu jamur dapat diolah lebih variatif menjadi produk olahan lainnya Selain itu KIM Tlogomas maupu menghasilkan produk-produk unggulan lainnya dengan memanfaatkan dan mengelola potensi lain yang dimiliki Kelurahan Tlogomas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tlogomas

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a) Dari Segi Sumber Daya Manusia

KIM Tlogomas memiliki anggota yang profesional yaitu yang terdaftar dalam susunan keanggotaan KIM Tlogomas. Selain itu telah ditetapkan struktur organisasi yang baik sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

2. Faktor Eksternal

- a) Dukungan dan Kerjasama yang Terjalin antara KIM Tlogomas dengan pihak Kelurahan Tlogomas.

KIM Tlogomas tidak lepas dari adanya dukungan pihak Kelurahan Tlogomas. Pihak kelurahan juga menjadi pengawas KIM dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga KIM dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tetap terkontrol dengan baik. Diharapkan KIM Tlogomas tidak hanya menjadi media informasi yang efektif, efisien dan komunikatif dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat Tlogomas, tetapi juga KIM Tlogomas dapat bersinergi dengan semua kegiatan Kelurahan Tlogomas untuk ikut membangun dalam peningkatan sumberdaya masyarakat Tlogomas.

- b) Antusias dan Partisipasi Masyarakat Tlogomas

Antusias dan partisipasi masyarakat Tlogomas dilihat dari ketersediaan masyarakat secara sukarela untuk menjadi anggota KIM baik anggota struktural yang bertugas menjalankan KIM dan masyarakat yang menjadi anggota binaan KIM untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a) Komitmen dari Anggota

Komitmen dari masing-masing anggota sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Namun dalam hal ini, komitmen dari anggota khususnya anggota struktural KIM sebagai pengurus dan pelaksana masih kurang. Hanya sebagian anggota yang aktif dan yang lainnya kurang aktif, karena sebagian memilih aktif pada kegiatan masing-masing. Hal tersebut disebabkan karena beberapa anggota dari struktural KIM Tlogomas juga sebagai pengurus organisasi lainnya di luar KIM. Sehingga mengakibatkan KIM tidak memiliki *time schedule* yang jelas untuk beberapa kegiatan. Tidak jarang juga jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan tidak terlaksana.

2. Faktor Eksternal

a) Dari Segi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Masih ada masyarakat yang belum bisa memanfaatkan perkembangan IPTEK secara optimal terutama dalam memperoleh berbagai informasi yang dapat menunjang pengetahuan mereka.

b) Sosial-Budaya Masyarakat

Masyarakat Tlogomas memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda-beda, kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga berbeda-beda. Tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas belum bisa memenuhi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat Tlogomas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi bahan pertimbangan untuk dilaksanakan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Potensi Wilayah yang diterapkan pada KIM Tlogomas Kota Malang selanjutnya. Berikut adalah beberapa saran yang peneliti rekomendasikan :

1. Meningkatkan komitmen dari para anggota pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIM Berbasis Potensi Wilayah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Kelurahan Tlogomas.
2. Terobosan-terobosan dan program kerja KIM Tlogomas dalam memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki wilayah Kelurahan Tlogomas masih perlu diwujudkan dan ditingkatkan sehingga masyarakat Tlogomas benar-benar dapat merasakan secara nyata manfaat adanya KIM.
3. Meningkatkan kerjasama antara KIM dengan kelurahan sehingga KIM Tlogomas diharapkan bisa menjadi mitra bagi kelurahan dalam mengembangkan dan membangun potensi wilayah Tlogomas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *Buku Profil Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang*. Malang: Dinas Komunikasi dan Informatika
- _____. 2012. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2012*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Hakim, EM Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogja: Ar-Ruzz Media
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Straginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kompas manajemen, Data pengguna Internet. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014 dari <http://tekno.kompas.com/.../>
- Dinas Kominfo, KIM Kota Malang. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014 dari <http://kominfo.malangkota.go.id /kim/>

KIM Tlogomas, Program Kerja KIM Tlogomas. Diakses pada tanggal 20 Januari 2015 dari <https://kimtlogomas.wordpress.com/>

_____, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

_____, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

_____, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



CURICULLUM VITAE

Nama : Ria Nur Ambarwati

Nomor Induk Mahasiswa : 115030100111046

Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 Oktober 1992

Alamat : Jalan Simpang Candi Panggung 53B Malang

No. Telepon : 085755903441

Email : ria.nurambar@yahoo.com

Pendidikan : 1. SDN Mojolangu II : 1999-2005
2. SMP Negeri 8 Malang : 2005-2008
3. SMA Negeri 9 Malang : 2008-2011





WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/186 /35.73.112/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "TLOGOMAS"
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG PERIODE 2014-2017

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia di Kelurahan, perlu dilakukan pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "TLOGOMAS" Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Periode 2014-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "TLOGOMAS" KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG PERIODE 2014-2017.

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat "TLOGOMAS" Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Periode 2014-2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

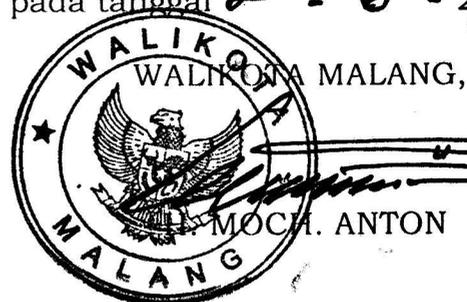
KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat "TLOGOMAS" Periode 2014-2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
- b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarkan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
- d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi;
- e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 - 6 - 2014



Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Malang;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
 6. Camat Lowokwaru Kota Malang;
 7. Lurah Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
 8. Anggota KIM dimaksud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/186 /35.73.112/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT "TLOGOMAS" KELURAHAN
TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG PERIODE 2014-2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "TLOGOMAS"
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG PERIODE 2014-2017

- I. Pembina : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Malang
- II. Pelindung : a. Camat Lowokwaru Kota Malang;
b. Lurah Tlogomas Kota Malang.
- III. Penasehat : a. Kepala Bidang Sarana Komunikasi
dan Desiminasi Indormasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
MALang;
b. Kepala Dewan Penelitian dan
Penelitian Masyarakat Universitas
Muhammadiyah Malang;
c. Ketua Forum KIM Kota Malang.
- IV. Ketua : Pantjawati Yustikarini, S.Sos
- V. Sekretaris : Niskha Sandriana, STP
- VI. Bendahara : Endang Yuli Astuti
- VII. Bidang-bidang :
- a. Bidang : 1. Tri Suciati, ST, M.AP (Unsur
Pengumpulan kelurahan Tlogomas);
Data/Informasi 2. Khoirul Setiawan (Unsur RW. I);
3. Sasmito Aji (Unsur RW. II);
4. Nur Jaini W. U. S.Kom (Unsur RW. III);
5. Farid (Unsur RW. IV);
6. Hermanto Gani, SE (Unsur RW. V);
7. Zainal Abidin (Unsur RW. VI);
8. Aron Sukmatanto (Unsur RW. VII);
9. Syarifudin Murad (Unsur RW. VIII);

- b. Bidang : 1. Drs. M. Muslikh, M.Si (Ketua LPMK);
Pengelolaan : 2. Dr. M. Irfan (Unsur DPPM Univ.
Data/Informasi : 3. Tarmuji (Unsur Kelurahan Tlogomas);
4. Candra E Sucahyo (Unsur BKM).
- c. Bidang : 1. Cholifah Sucahyo (Unsur Radio
Penyebaran : 2. M. Fikri Nusantatar (Unsur Karang
Data/Informasi : 3. Hendra (Unsur Karang Taruna).
- d. Bidang Umum : 1. Suprobo (Unsur Kelurahan);
2. Kun Armintarti (Unsur BKM);
3. Darto (Unsur RW. II).

